**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Perkembangan kehidupan sosial yang semakin kompleks telah membawa pengaruh pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Berbagai tuntutan akan kebutuhan hidup yang harus terpenuhi, terutama kebutuhan ekonomi telah memaksa individu atau kelompok masyarakat untuk menentukan pilihan dalam hidupnya. Hal tersebut dikarenakan oleh semakin ketatnya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sementara pada sisi yang lain, lapangan kerja yang tersedia semakin sempit.

Di era sekarang ini, masyarakat dipaksa untuk mampu bersaing pada berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek kehidupan sosial ekonomi. Pada aspek sosial, masyarakat dituntut untuk mampu menjaga keseimbangan kehidupan sosial sebagai cerminan akan esensi manusia sebagai makhluk sosial, kemudian pada aspek ekonomi manusia dituntut untuk mampu memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia harus mampu meletakkan perannya sebagai penyeimbang diantara tuntutan individu atau kewajibannya sebagai makhluk individu dan tuntutan kehidupan sosial atau kewajibannya sebagai makhluk sosial. Dengan peran seperti itu, maka manusia akan mampu menciptakan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

1

Sebagai makhluk sosial, manusia juga sering melakukan penyimpangan dan menciptakan ketidakseimbangan dalam kehidupan sosial, dimana manusia sendiri kerapkali menjadi bagian dari masalah sosial yang ada. Perubahan-perubahan yang terjadi, baik perubahan ke arah positif maupun ke arah negatif semuanya tidak terlepas dari peran manusia itu sendiri. Demikian halnya dengan perubahan pola aktivitas masyarakat di Panti Pijat D’Top Penakkukang Kota Makassar.

Dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi pasal 1 ayat 7 dijelaskan Panti Pijat D’Top adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih. Berdasarkan peraturan ini, Panti Pijat D’Top termasuk dalam kategori usaha kepariwisataan. Adapun dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 5 tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata pasal 1 point 7, pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang kepariwisataan. Kemudian pada pasal 22 ayat 1 dijelaskan jenis usaha-usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi terdiri dari gelanggang olahraga, gelanggang seni, arena permainan, hiburan malam, Panti Pijat D’Top, taman rekreasi, karaoke, jasa impresariat, salon kecantikan, tukang cukur (*barber shop*), kolam memancing, bioskop, mesin permainan, pentas pertunjukan satwa, balai pertemuan umum, dan dunia fantasi.

Mengacu pada Perda tersebut, maka Panti Pijat D’Top merupakan salah satu usaha hiburan dan rekreasi masyarakat. Dengan demikian, Panti Pijat D’Top merupakan bagian dari kegiatan kepariwisataan. Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, fungsi Panti Pijat D’Top adalah sebagai tempat hiburan dan rekreasi masyarakat dimana di dalamnya tersedia jasa pemijatan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap pengunjung guna mendapatkan timbal balik berupa upah dari pengunjung Panti Pijat D’Top kepada pemberi jasa pijat (pemijat).

Namun demikian, aktivitas masyarakat di Panti Pijat D’Top Penakkukang Kota Makassar telah banyak mengalami pergeseran ke arah negatif. Panti Pijat D’Top Penakkukang Kota Makassar telah berubah fungsi menjadi tempat praktek perilaku menyimpang. Berbagai media cetak dan online kerapkali mengungkap berbagai pemberitaan negatif tentang beralihnya fungsi Panti Pijat D’Top Penakkukang Kota Makassar. Sebut saja media KBN-News Makassar, memberitakan tentang Kepolisian Sektor (Polsek) Panakukang Kota Makassar merazia sejumlah Panti Pijat D’Top dan refleksi kesehatan pria dan wanita di wilayah Toddopuli Kecamatan Panakukang Kota Makassar belum lama ini. Razia tersebut dilakukan terkait persoalan adanya indikasi tempat Panti Pijat D’Top tersebut adalah tempat prostitusi oleh para penjaja seks di daerah. Belasan wanita terjaring razia oleh pihak Polsek Panakukang (baca: <http://m.beritakotaonline.com/1378/jelang-ramadhan-polsek-panakkukang-razia-panti-pijat/> (dikases tanggal 28 Oktober 2015).

Sumber yang lain pun memberitakan hal yang sama, bahwa di beberapa tempat di Kota Makassar, praktek prostitusi tidak seterbuka kota-kota lainnya, seperti di Bandung yang memiliki kawasan lokalisasi Saritem, Yogyakarta yang identik dengan lokalisasi Pasar Kembang dan lokalisasi Gang Dolly yang baru saja ditutup Walikota Surabaya. Di kawasan jalan Nusantara dan kawasan Pecinan, lokasi prostitusi berkedok tempat karaoke, hotel kelas melati dan Panti Pijat D’Top. Panti Pijat D’Top umumnya beroperasi dari pukul 10.00 Wita hingga pukul 21.00 Wita. Sedangkan tempat karaoke mulai ramai sejak pukul 21.00 Wita hingga pukul 02.00 Wita. (sumber: <http://news.detik.com/berita/2614328/mengintip-praktik-prostitusi-tersembunyi-di-makassar/> diakses tanggal 28 Oktober 2015).

Lebih lanjut sumber online tersebut memberitakan, di salah satu hotel kelas melati di kawasan jalan Nusantara, malah menyediakan jejeran gadis-gadis pramunikmat berkedok bar yang dibanderol tarif sekali kencan sekitar Rp 200 ribuan sudah termasuk ongkos *check in* hotelnya. Umumnya pelanggannya adalah pelancong yang singgah di pelabuhan atau para pendatang dari luar kota (sumber: <http://news.detik.com/berita/2614328/mengintip-praktik-prostitusi-tersembunyi-di-makassar/> diakses tanggal 28 Oktober 2015).

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di lokasi yang akan menjadi lokasi penelitian, untuk Panakukkang sendiri merupakan lokasi terbanyak ditempati jenis usaha tersebut. Layaknya tempat perawatan tubuh pada umumnya, hampir seluruh usaha pijat plus-plus memiliki fasilitas lengkap seperti sauna, kolam air panas, ruang pijat dan sebagainya. Kawasan Panti Pijat D’Top plus-plus sendiri banyak beroperasi di kawasan Panakukang, mulai dari Jalan Boulevard, Jalan Pengayoman dan Jalan Toddopuli. Selain di Panakukang, kawasan Pecinan juga banyak Panti Pijat D’Top.

Dari hasil observasi yang dilakukan, dapat diidentifikasi individu atau kelompok masyarakat yang banyak berkunjung di Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar meliputi individu atau masyarakat berkunjung untuk bernyanyi (karaoke), rekreasi, berkunjung untuk pijat biasa, dan ada juga yang berkunjung melakukan praktek prostitusi.

Perubahan fungsi Panti Pijat D’Top tersebut dapat dilihat sebagai wujud perkembangan kehidupan masyarakat global yang semakin kompleks. Dalam kehidupan masyarakat global, aktivitas manusia sering dipengaruh oleh aktivitas kehidupan manusia yang lainnya. Antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya saling memberikan pengaruh satu sama lain pada setiap interaksi yang terjadi, dimana salah satunya tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh yang lainnya. Dunia modern adalah sebuah sangkar besi sistem rasional di mana tiada lubang untuk melepaskan diri darinya (Ritzer & Goodman, 2011: 4).

Modernisasi yang telah melanda masyarakat dunia dewasa ini telah melahirkan sikap kebergantungan di antara kelompok masyarakat yang ada. Sementara di satu sisi nilai-nilai moral dan agama sebagai penangkal perkembangan kehidupan manusia modern semakin terkikis. Kohesi moral dunia modern lebih lemah ketimbang di dalam masyarakat sebelumnya (Ritzer & Goodman, 2011: 4). Kehidupan modern merupakan perubahan kehidupan masyarakat ke arah semakin maju dan kompleks. Manusia sendiri tidak memiliki kekuatan untuk melepaskan diri dari perubahan-perubahan yang ada.

Masyarakat Panti Pijat D’Top merupakan bagian dari masyarakat dunia. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, maka perubahan aktivitas masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk perubahan fungsi Panti Pijat D’Top yang semakin kompleks, dimana semula berfungsi sebagai tempat menawarkan jasa pijat dari kelompok masyarakat tertentu kemudian berubah fungsi menjadi tempat berlangsungnya praktek penyimpangan termasuk prostitusi.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka penelitian ini akan diarahkan untuk mengkaji secara lebih mendalam perubahan fungsi Panti Pijat D’Top di Kecamatan Penakkukang Kota Makassar dengan judul penelitian “Panti Pijat D’Top Sebagai Wadah Perilaku Menyimpang (Studi Kasus di Panti Pijat D’Top Kecamatan Panakkukang Kota Makassar)”. Adapun dasar pemikiran secara ilmiah yang melatarbelakangi penelitian tentang perilaku masyarakat masyarakat Panti Pijat D’Top ini adalah dimana Panti Pijat D’Top merupakan wadah atau sebagai salah satu tempat terjadinya interaksi sosial masyarakat dengan beragam aktivitas. Pada konteks ini, Panti Pijat D’Top merupakan bagian dari tuntutan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap fakta-fakta sosial yang menarik dibalik difenomena Panti Pijat D’Top dengan melihat dan mengkajinya berdasarkan teori-teori sosial yang ada.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi perubahan fungsi Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar?
2. Bagaimanakah peran pemerintah dalam mencegah terjadinya penyimpangan di Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar?
3. Bagaimana implikasi sosial dari keberadaan Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar?
4. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai untuk mengetahui dan mengkaji:

1. Faktor yang melatarbelakangi perubahan fungsi Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar.
2. Peran pemerintah dalam mencegah terjadinya penyimpangan di Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar.
3. Implikasi sosial dari keberadaan Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar.

1. **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ranah ilmu sosiologi sebagai salah satu disiplin ilmu yang mengkaji tentang manusia sebagai makhluk sosial.

1. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama bagi masyarakat di Kecamatan Penakkukang Kota Makassar terkait dengan berbagai faktor yang metarbelakangi perubahan fungsi Panti Pijat D’Top. Di satu sisi sebagai dasar bagi pemerintah dalam mengeluarkan berbagai aturan dan kebijakan yang permanen untuk mengatur aktivitas masyarakat Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian tinjauan pustaka ini akan diawali dengan mengemukakan hasil penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti. Kemudian mendeskripsikan tentang konsep perilaku menyimpang dan seks menyimpang, konsep prostitusi, bentuk-bentuk prostitusi, faktor-faktor penyebab prostitusi, dampak sosial prostitusi, dan dilanjutkan dengan kajian tentang *grand theory* yang dianggap relevan dengan masalah yang dikaji, yaitu teori penyimpangan sosial (deviasi sosial), teori diferensiasi sosial, dan teori integrasi sosial. Terakhir pada bagian ini dikemukakan kerangka konseptual penelitian.

1. **Konsep Perilaku Menyimpang**
2. **Pengertian Perilaku Menyimpang**

Dalam perspektif perilaku menyimpang, masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah kerana dapat membahayakan tegaknya sistem sosial.

Secara umum perilaku menyimpang dapat diartikan sebagai tingkah laku yang melanggar atau bertentangan dengan aturan normatif dan pengertian normatif maupun dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan. Menurut Robert M.Z Lawang (Kamanto Sunarto, 2006:76) perilaku menyimpang adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulakan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang. Lebih lanjut dijelaskan penyimpangan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer adalah suatu bentuk perilaku menyimpang yang bersifat sementara dan tidak dilakukan secara terus-menerus sehingga masih dapat ditolerir masyarakat seperti melanggar lalu lintas,buang sampah sembarangan dan lain-lain. Sedangkan penyimpangan sekunder yakni perilaku menyimpang yang tidak mendapat toleransi dari masyarakat dan umumnya dilakukan berulang kali seperti merampok, menjambret, memakai narkoba, menjadi pelacur, tawuran dan lain-lain (Kamanto Sunarto, 2006:78).

9

Perilaku menyimpang dalam defenisi umum tersebut dapat dibedakan dari abnormalitas statis. Ada kesepakatan bahwa perilaku menyimpang tidak berarti menyimpang dari norma-norma tertentu. Konsep perilaku menyimpang ini juga perlu dibedakan dari perilaku yang kurang diinginkan dan dari peranan yang menyimpang. Karena tidak semua tingkah laku yang tidak diinginkan menyimpang dari aturan-aturan normatif, dan dilain pihak dan belum tentu perilaku menyimpang dari aturan normatif itu tidak diinginkan.

Secara umum yang digolongkan sebagai perilaku menyimpang adalah sebagai berikut:

1. Tindakan yang nonconform yaitu: perilaku yang tidak sesuai dengannilai-nilai dan norma-norma yang ada. Contoh tindakan nonconform: Membolos sekolah, Merokok di area parkir, Membuang sampah sembaranagan,
2. Tindakan Asosial yaitu: tindakan yang melawan kebiasaan masyarakat dan kepentingan umum. Contoh tindakan asosial: Minum-minuman keras, Menggunakan narkoba, Terlibat di dunia prostitusi.
3. Tindakan-tindakan criminal yaitu: tindakan yang nyata-nyata telah melanggar aturan hukum tertulis dan mengancam keselamatan orang lain.  
   Contok tindakan kriminal: Korupsi, Pembunuhan, Pencurian.

Dalam penelitian ini telah dipilih bahwa konsep perilaku menyimpang adalah tingkah laku yang dinilai menyimpang dari aturan-aturan normatif. Konsep ini akan dibedakan dari gejala-gejala lain yang sering sekali diklasifikasikan sebagai perilaku menyimpang seperti tingkah laku yang statis abnormal, tingkah laku yang kurang diinginkan secara sosial, dan peranan yang menyimpang. Perilaku menyimpang dalam penelitian ini merujuk pada tingkah laku individu yang ada di Panti Pijat Kebugaran Jasmani D’Top Jalan Miran Seruni Kecamatan Penakkukang Kota Makassar. Menurut Soerjono Soekanto (2006: 95) perilaku menyimpang disebut sebagai salah satu penyakit masyarakat atau penyakit sosial. Penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat-istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum. Disebut sebagai penyakit masyarakat karena gejala sosialnya yang terjadi ditengah masyarakat itu meletus menjadi ”penyakit”.

1. **Bentuk-bentuk perilaku menyimpang**

Dr. Kartini Kartono (2013:18) membagi perilaku menyimpang tersebut kedalam beberapa bentuk yaitu:

1. Penyimpangan Primer marupakan penyimpangan yang terorganisasi secara subjektif dalam diri pribadi, lalu ditransformasikan/diubah dalam bentuk peranan**-**peranan aktif tertentu. Selanjutnya dijadikan kebiasaan atau kriteria sosial yang menetap guna mendapatkan status sosial. Pada akhirnya, individu yang menyimpang itu menyadari betul peranan patologis yang dilakukannya. Dia memandang peranan tersebut sebagai hal yang wajar dan cocok dengan pola sosio**-**psikologis masyarakat.
2. Penyimpangan sekunder yaitu apabila seseorang mulai menggunakan tingkah laku penyimpang itu sebagai alat pembelaan diri, atau alat menyerang atau alat penyesuaian diri terhadap segala kesulitan (kesulitan sebagai konsekuensi atau produk dari reaksi**-**reaksi sosial terhadap tingkah laku yang sosiopatik).
3. Penyimpangan individual merupakan gejala personal, pribadi atau individual, sebab ditimbulkan oleh ciri**-**ciri yang unik dari individu itu sendiri. Yaitu berasal dari anomali**-**anomali (penyimpangan dari hukum, kelainan**-**kelainan), variasi**-**variasi biologis dan kelainan psikis tertentu yang sifatnya herediter ada sejak lahir. Kelainan ciri tingkah bisa juga disebabkan oleh penyakit dan kecelakaan. Selain itu Sofyan (2012:93) menjelaskan penyimpangan individu disebabkan oleh faktor predisposing *(predisposing factor*) berupa kejadian**-**kejadian ketika kelahiran bayi berupa luka dikepala saat bayi ditarik dari perut ibu. Faktor Predisposing yang lain berupa kelainan berupa kelainan jiwa seperti schizophrenia**.** Penyakit jiwa ini juga dipengaruhi oleh lingkungan keluarga yang keras atau penuh dengan tekanan tarhadap anak-anak
4. Penyimpangan situsional merupakan penyimpangan yang dipengaruhi oleh keadaan sosial diluar individu atau oleh pangaruh situasi, dimana peribadi yang bersangkutan menjadi bagian integral dari dirinya. Situasi tadi mebreika pengaruh yang memaksan sehingga individu tersebut terpaksa aharus melanggar peraturan dan norma**-**norma umum atau hukum formal. Jika anak**-**istri hampir mati kelaparan dan tidak adak jalan lain untuk mendapatkan bahan makanan kecuali dengan mencuri, sehingga bapak/ayahnya yang bersangkutan terpaksa harus mencuri.
5. Penyimpangan sistematik pada hakekatnya adalah sub kultur atau satu system tingkah laku yang diserta organisasi social yang khusus, status formal, peranan**-**peranan, nilai**-**nilai, rasa kebanggaan, norma, dan moral tertentu yang semuanya berbeda dengan situasi umum. Segala pikiran dan perbuatan yang menyimpang dari norma umum, dirasionalisasikan atau dibenarkan oleh semua anggota kelompok dengan pola yang menyimpang itu. Sehingga penyimpang tersebut menjadi penyimpangan yang terorganisasi atau sitematik. Organisasi dari kelompok penyimpangan ini sangat bervariasi, yaitu dari koloni/kelompok informal dengan ikatan longgar, misalnya berupa geng anak-anak nakal dari golongan berstatus *jet set* (anak pejabat dan orang**-**orang breduit) sampai pada kelompok**-**kelompok aksionis radikal**-**revolusioner, dengan struktur organisasi yang ketat dan rapi, disiplin tinggi, dan hukuman**-**hukuman yang berat.
6. **Macam-macam perilaku menyimpang**

Macam-macam penyimpangan menurut Robert M. Lawang sebagaimana yang dikutip dalam Kamanto Sunarto, (2006:80) ada empat macam penyimpangan ,yaitu ;

1. Perilaku menyimpang yang dianggap sebagai kejahatan atau criminal
2. Penyimpangan seksual,yaitu perilaku seksual yang tidak lazim ,dan lain dari biasanya
3. Penyimpangan dalam bentuk gaya hidup yang lain dari biasanya
4. Penyimpangan dalam bentuk pemakaian atau mengkonsumsi obat-obatan dan minum-minuman keras yang berlebihan.
5. **Ciri-ciri perilaku menyimpang**

Menurut [Paul B. Horton](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul_B._Horton&action=edit&redlink=1) sebagaiaman yang dikutip dalam Soekanto (2006:76) perilaku menyimpang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Penyimpangan harus dapat didefinisikan.

[Perilaku](http://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku) dikatakan menyimpang atau tidak harus bisa di[nilai](http://id.wikipedia.org/wiki/Nilai) berdasarkan kriteria tertentu dan diketahui penyebabnya.

1. Penyimpangan bisa diterima bisa juga ditolak.

Perilaku menyimpang tidak selamanya negatif, ada kalanya penyimpangan bisa diterima [masyarakat](http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat), misalnya wanita karier. Adapun pembunuhan dan perampokan merupakan penyimpangan sosial yang ditolak masyarakat.

1. Penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak.

Semua orang pernah melakukan perilaku menyimpang, akan tetapi pada batas-batas tertentu yang bersifat relatif untuk semua orang. Dikatakan relatif karena perbedaannya hanya pada [frekuensi](http://id.wikipedia.org/wiki/Frekuensi) dan kadar penyimpangan. Jadi secara umum, penyimpangan yang dilakukan setiap orang cenderung [relatif](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Relatif&action=edit&redlink=1). Bahkan orang yang telah melakukan penyimpangan mutlak lambat laun harus berkompromi dengan [lingkungannya](http://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan).

1. Penyimpangan terhadap [budaya](http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya) nyata ataukah budaya ideal.

Budaya ideal adalah segenap peraturan [hukum](http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum) yang berlaku dalam suatu [kelompok](http://id.wikipedia.org/wiki/Kelompok) [masyarakat](http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat). Akan tetapi pada kenyataannya tidak ada seorang pun yang [patuh](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Patuh&action=edit&redlink=1) terhadap segenap peraturan [resmi](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Resmi&action=edit&redlink=1) tersebut karena antara budaya nyata dengan budaya ideal selalu terjadi kesenjangan. Artinya, peraturan yang telah menjadi[pengetahuan](http://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan) umum dalam kenyataan kehidupan sehari-hari cenderung banyak dilanggar.

1. Terdapat [norma](http://id.wikipedia.org/wiki/Norma)-norma penghindaran dalam penyimpangan.

Norma penghindaran adalah [pola](http://id.wikipedia.org/wiki/Pola) perbuatan yang dilakukan orang untuk memenuhi keinginan mereka, tanpa harus menentang [nilai](http://id.wikipedia.org/wiki/Nilai)-nilai tata kelakukan secara terbuka. Jadi [norma](http://id.wikipedia.org/wiki/Norma)-norma penghindaran merupakan bentuk penyimpangan [perilaku](http://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku) yang bersifat setengah me[lembaga](http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga).

1. Penyimpangan sosial bersifat [adaptif](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Adaptif&action=edit&redlink=1) (menyesuaikan). Penyimpangan sosial tidak selamanya menjadi ancaman karena kadang-kadang dapat dianggap sebagai alat pemikiran [stabilitas](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Stabilitas&action=edit&redlink=1) sosial
2. **Faktor penyebab perilaku menyimpang**
3. Faktor individu
4. Lemahnya pertahanan diri

Lemahnya pertahanan diri seorang individu untuk mengotrol pengaruh**-**pengaruh negatif dari lingkungan berupa tontonan negatif atau bujukan negatif seperti pecandu dan pengedar narkoba serta ajakan**-**ajakan untuk melakukan perbuatan negatif sering tidak bisa terhidarkan dan mudah terpengaruh. Oleh karena demikian seorang individu harus dilatih untuk meningkatkan daya tolak terhadap pengaruh negatif yang datang dari luar. Dalam hal ini Trower dalam Sofyan (2012:95) mengembangkan ketrampilan social dalam menolak pengaruh negative terhadap perilaku individu. Yang lebih baik dari model Trower ini adalah dari Argyle dan Kendor yang mengembangkan ketrampilan sosial dalam tiga tahapan yaitu *pertama*, mengembangkan persepsi terhadap bahaya-bahaya yang ada dilingkungan. *Kedua*, menafsirkan persepsi tersebut. *Ketiga*, tindakan (aksi) yang terencana untuk melawan bahaya.

1. Kurangnya kemampuan penyusuaian diri individu

Keadaan ini amat terasa dalam diri individu pada saat**-**saat individu memasuki jenjang usia sekolah terutama usia sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA). Banyak ditemukan individu yang kurang pergaulan (kuper). Inti persoalannya adalah ketidakmampuan penyusuaian diri terhadap lingkungan sosia, karena dengan mempunyai daya pilihan teman bergaul yang akan membantuk pembentukan perilaku positif. Anak yang terbiasa dengan pendidikan kaku dan dengan disiplin ketat dikeluarga akan menyebabkan masa remaja atau masa-masa sekolahnya juga kaku dalam bergaul, dan tidak pandai memilih teman yang bisa membuat berkelakuan baik. Yang terjadi sebaliknya individu salah asuh serta bergaul dengan teman**-**teman yang tersesat.

1. Kurangnya dasar**-**dasar keimanan individu

Masalah agama belum menjadi upaya sungguh**-**sungguh dari orang tua dan guru terhadap diri individu, padahal agama bisa menjadi benteng bagi individu dalam menghadapi cobaan yang datang padanya sekarang dan dimasa yang akan datang. Sekolah dan orang tua harus bekerja sama bagaimana memberikan pendidikan agama secara baik, mantap, dan sesuai dengan kondisi individu saat ini. Jika dilihat kondisi pelajaran agama islam di SMP maupun SMA sangat menyedihkan, guru agama hanya memberikan pelajaran agama hanya sekedar tugasnya beres. Sulit bagi seorang guru maupun orang tua memberikan pelajaran agama secara menarik agar siswa punya kemauan tinggi dalam belajar agama. Hal ini akan menjadi factor terpenting bagi individu untuk bisa terhindar dari perilaku menyimpang.

1. Faktor keluarga
2. Kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua

Kurangnya kasih sayang dan perhatian orang tua sebagaimana yang individu harapakan akan memaksa mereka mencari perhatian diluar rumah, bergabung dengan teman-temannya apalagi teman**-**temannya belum tentu berperilaku baik. Kelompok anak seperti ini dinamakan kelompok anak nakal, ada juga yang menyebutnya Geng. Mereka berkelompok untuk memenuhi kebutuhan yang hampir sama, antara lain ingin mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua dan masyarakat. Karena kasih sayang dan perhatian itu jarang ditemui di rumah maka didalam geng tersebut anak yang tidak mendapatkan kasih sayang orang tua dan masyarakat, oleh kepala geng diberi pelayanan yang baik serta penghargaan sehingga membuat anak merasa betah. Padahal norma**-**norma yang dianut oleh geng itu tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan norma**-**norma yang berlaku didalam masyarakat.

1. Lemahnya keadaan ekonomi orang tua

Masa sekolah adalah masa yang penuh dengan keinginan**-**keinginan, keindahan**-**keindahan, dan cita**-**cita. Para siswa menginginkan model pakaian, kendaraan, hiburan dan sebaginnya. Hal ini disebab oleh maju dan berkembangnya industri dan teknologi sampai pada pelosok**-**pelosok desa serta pengaruh budaya *weternisasi* barat. Anak menuntut supaya orang tuanya dapat membeli barang**-**barang mewah seperti mobil, sepeda motor dll. Bersamaan dengan itu kelakuan mereka meningkat yakni pergaulan bebas, seks bebas, merokok, dan minuman keras. Bila orang tua tidak mampu memenuhi keinginannya, maka mereka merasa rendah diri. Akibatnya timbullah berbagai masalah sosial yang disebab kelakuan siswa yang gagal memenuhi kebutuhan tersebut. Seperti mencuri, merampok serta perilaku menyimpang lainnya.

1. Kehidupan keluarga yang tidak harmonis

Sebuah keluarga dikatakan harmonis apabila struktur keluarga itu utuh dan interaksi diantara anggota keluarga berjalan dengan baik, artinya hubungan psikologis diantara mereka cukup memuaskan dirasakan oleh setiap anggota keluarga. Apabila struktur keluarga itu tidak utuh lagi, misalnya karena kematian sala satu oarng tua atau perceraian, kehidupan keluarga bias menjadi tidak harmonis. Keadaan tersebut disebut keluarga pecah atau *broken home*.

1. Faktor lingkungan masyarakat

Dikutip dalam Soekanto (2006: 93) keadaan lingkungan masyarakat yang juga mempengaruhi perilaku menyimpang diantaranya:

1. Kurangnya pelaksanaan ajaran agama secara konsekuen

Masyarakat dapat pula menjadi penyebab bagi timbulnya perilaku menyimpang siswa, terutama di lingkungan masyarakat yang kurang sekali melaksanakan ajaran-ajaran agama yang dianut. Didalam agama banyak sekali hal-hal yang dapat membantu pembinaan anak pada umumnya dan para siswa khususnya. Misalnya ajaran tentang perbuatan baik pada orang tua, beramal sholeh kepada masyarakat, suka menolong dan lain**-**lain. Akan tetapi tindak perbuatan masyarakat kadang**-**kadang bertentangan dengan norma agama. Kadang**-**kadang sebagian anggota masyarakat telah melupakan ajaran agama yang dianut sehari**-**hari karena terpaku kepada oleh kehidupan yang bersifat materi. Sehingga seorang anak atau siswa sulit sulit mendapatkan contoh dan teladan yang baik dari masyarakat.

1. Keadaan masyarakat yang kurang berpendidikan

Sebagian masyarakat terutama dipelosok**-**pelosok desa yang belum menikmati pemerataan pendidikan secara baik, mengakibatkan keterbelakang dalam hal pendidikan. Buta huruf menjadi sala satu gagalnya proses pendidikan hal ini akan berdampak pada kurangnya aya analisis, daya keratif, sebagainya. Disamping itu oarng yang buta huruf pada umumnya bersikap rendah diri, kurang berani, pesimis dan sebagiannya. Orang tua yang kurang berpendidikan sering mebiarkan anak**-**anaknya untuk melakukan tindakan**-**tindakan apa saja yang sesuia dengan keinginan si anak dan tidak jarang keinginan**-**keinginan tersebut kadang menjerumuskan si anak pada perbuatan negative, foya**-**foya, pergaulan bebas, minum-minuman keras, merokok, ganja dan sebaginya.

1. Kurangnya pengawasan terhadap individu

Sebagian remaja beranggapan bahwa orang tua dan guru terlalu ketat sehingga tidak memberikan kebebasan baginya. Sebagian lain mengatakan bahwa orang tua mereka dan bahkan guru, tidak pernah memberikan pengawasan terhadap tingkah laku remaja sehingga menimbulkan berbagai perilaku menyimpang oleh si anak

Pengawasan hendaknya harus dimulai dari kecil saat anak masih mudah untuk dibimbing dan diarahkan, karena pada saat itu anak masih belum punya kemampuan untuk berdiri sendiri. Jika pengawasan anak baru dimulai dengan ketat di masa remaja akan mengakibatkan timbulnya konflik antara anak dan orang tua. Pengawasa terhadap anak dimaksudkan untuk menghindari si anak berperilaku menyimpang yang akan merugikan dirinya sendiri, orang tua maupun masyarakat umum.

1. Pengaruh nilai**-**nilai baru dari luar

Kebanyakan sebagian anggota masyarakat beranggapan bahwa setiap norma yang baru datang dari luar, itulah yang benar. Sebagai contoh ialah norma yang datang dari barat yang tayangkan melalui televisi invidu cepat menelannya, baik berupa model pakian, pergaulan, cara berkomunikasi dan sebaginya. Padahal perilaku tersebut tidak disukai oleh masyarakat. Istilah modern bagi mereka adalah apa yang datang dari barat. Hal ini kemudian menjalar ke desa**-**desa, anak**-**anak remaja didesa mulai terpengaruh oleh keadaan ini. Sehingga ia konflik dengan lingkungannya karena masyarakat desa masih berpegang teguh pada ajaran agama dan adat istiadat. Pertentangan antara norma yang berlaku dimasyarakat dengan yang dianut oleh individu menjadi sumber adanya perilaku menyimpang remaja.

1. **Konsep Prostitusi**
2. **Pengertian Prostitusi**

Kata prostitusi berasal dari perkataan latin *prostituere* yang berarti menyerahkan diri dengan terang-terangan kepada perzinahan. Sedangkan secara etimologi berasal dari kata *prostare* artinya menjual, menjajakan (Simandjuntak, 1985: 112). Jadi, prostitusi adalah suatu transaksi antara si perempuan pelacur dan si pemakai jasa pelacur yang memberi sejumlah uang untuk interaksi seksual (Saptari, 1997: 391). Prostitusi adalah melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan yang bukan istri atau suaminya, yang dilakukan di tempat-tempat tertentu (lokalisasi, hotel, tempat rekreasi dan lain-lain), yang pada umumnya mereka mendapatkan uang setelah melakukan hubungan badan (Eka Dewi, 2012: 81). Dalam pasal 296 KUHP mengenai prostitusi tersebut meyatakan: “Barang siapa yang pekerjaanya atau kebiasaanya, dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya seribu rupiah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa prostitusi merupkan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh individu dalam suatu kelompok masyarakat dengan cara melakukan hubungan seks terlarang dengan harapan mendapat sejumlah uang. Perbuatan tersebut disebabkan oleh banyak faktor, baik ekonomi, psikologi, maupun sosial masyarakat.

1. **Bentuk-bentuk Prostitusi**

Menurut Kartini Kartono (2005:209) ada beberapa orang yang termasuk kategori pelacuran atau prostitusi yaitu:

1. Penggundikan yaitu pemeliharaan istri tidak resmi, istri gelap atau perempuan piaraan. Mereka hidup sebagai suami istri, namun tanpa ikatan perkawinan.
2. Tante girang yaitu wanita yang sudah menikah, namun tetap melakukan hubungan seks dengan laki-laki lain, untuk mengisi waktu kosong dan bersenang-senang dan mendapatkan pengalaman-pengalaman seks lain.
3. Gadis-gadis bar yaitu gadis-gadis yang bekerja sebagai pelayan-pelayan bar dan sekaligus bersedia memberikan layanan seks kepada para pengunjung.
4. Gadis-gadis bebas yaitu gadis-gadis yang masih sekolah atau putus sekolah, putus studi akademik atau fakultas, yang mempunyai pendirian yang tidak baik dan menyebarluaskan kebebasan seks untuk mendapatkan kepuasan seksual.
5. Gadis-gadis panggilan adalah gadis-gadis dan wanita-wanita yang biasa menyediakan diri untuk dipanggil dan dipekerjakan sebagai pelacur, melalui penyaluran tertentu.
6. Gadis-gadis taxi, yaitu gadis-gadis panggilan yang ditawar-tawarkan dan dibawa ketempat-tempat hiburan dengan taxi-taxi tersebut.
7. Hotstes atau pramuria yaitu wanita-wanita yang menyamarkan kehidupan malam dalam nightclub. Yang pada intinya profesi *hostess* merupakan bentuk pelacuran halus.
8. Promisikuitas inilah hubungan seks secara bebas dengan pria manapun juga atau dilakukan dengan banyak laki-laki.

Dari tinjauan berdasarkan kategori prostitusi diatas, maka prostitusi yang terjadi di kalangan putih abu-abu ini termasuk kategori gadis-gadis bebas. Alasan prostitusi ini termasuk prostitusi gadis-gadis bebas adalah dimana para wanita atau gadis-gadis ini masih berstatus duduk di bangku sekolah menengah atas, dimana mereka akan melakukan seks dengan para pria manapun yang mereka kehendaki untuk memuaskan nafsu para lelaki hidung belang yang bisanya sudah beristri.

Menurut Kartini Kartono (2013:251), bentuk-bentuk prostitusi ada dua yaitu :

1. Prostitusi yang terdaftar (legal) yaitu pelakuan dalam prostiitusi ini diawasi bagian *vice contro*l dari kepolisian, yang dibantu dan bekerja sama dengan departemen sosial dan kesehatan. Pada umumnya mereka (pelacur) dilokalisir dalam satu daerah tertentu, kemudian penghuninya secara periodik harus memeriksa diri pada dokter atau petugas kesehatan dan mendapatkan suntikan serta pengobatan, sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum.
2. Prostitusi tidak terdaftar (illegal), yaitu orang-orang yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun dalam kelompok, perbuatannya tidak terorganisir tempatnya pun tidak tertentu, sehinga kesehatan sangat diragukan karena belum tentu mau memeriksa kesehatan pada dokter.

Dari bentuk-bentuk prostitusi diatas prostitusi di kalangan putih abu-abu ini termasuk dalam prostitusi yang tidak terdaftar (illegal), karena dilakukan secara diam-diam dan tertutup tidak ada campur tangan dari pihak departemen sosial dan

kepolisian.

1. **Faktor-faktor Penyebab Prostitusi**

Alasan-alasan mengapa seseorang menjadi pelacur bisa sangat kompleks, tidak saja dari prostitusi itu sendiri melainkan juga dari keluarga dan masyarakat disekelilingnya. Tetapi secara sengaja menjadi prostitusi jarang dijumpai sebagai salah satu faktor penyebabnya, karena bagaimanapun pekerjaan ini dianggap bertentangan dengan normal (Sulistyaningsih, 1997: 37).

Ada beberapa faktor yang umum yang menjadi penyebab timbulnya prostitusi, antara lain sebagai berikut:

1. Keadaan Ekonomi

Menurut M. Dalyono (1997 : 240-241) keadaan ekonomi digolongkan dalam dua kategori yaitu: (1) Keadaan yang kurang (miskin), yaitu keadaan dimana tidak terpenuhinya sandang, pangan, papan (kebutuhan primer) dan hidupnya serba kekurangan; dan (2) Ekonomi yang berlebihan (Kaya), yaitu Keadaan dimana tidak hanya kebutuhan primer saja yang terpenuhi tetapi kebutuhan sekunder terkadang juga terpenuhi. Apabila memahami tentang ekonomi dalam statifikasi sosial, berarti membedakan diri kita dengan orang lain dengan aspek ekonomi, seperti dari faktor kekayaan, kekayaan yang dimiliki, jenis pekerjaan dan pendidikan yang dimiliki.

b). Pendidikan

Pengertian pendidikan berasal dari kata “didik” mendapat awalan “me” sehingga menjadi “mendidik”, yang artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi pelatihan diperlikan adanya ajaran, tuntunan, pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Pendidikan menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia (1991 : 232), ialah proses merubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dalam pengertian agak luas, pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga seseorang dapat memperoleh ilmu pengetahuan, pemahaman dan cara laku yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Jadi pendidikan merupakan tahapan kegiatan yang bersifat kelembagaan yang digunakan untuk menyempurnakan perkembangan individu dan menguasai pengetahuan, kebiasaan, sikap, dan sebagainya. Pendidikan dapat berlangsung secara formal dan non formal disamping secara formal seperti di sekolah, madrasah, dan instansi-instansi lainnya. Bahkan menurut definisi diatas pendidikan juga dapat berlangsung dengan cara mengajar dirinya sendiri (M. Dalyono, 1997 :4-6).

1. Keluarga

Keluarga merupakan suatu satu kesatuan sosial yang terkecil yang terdiri dari suami, istri dan jika ada anak- anak dan didahului oleh perkawinan (Ahmad, Abu. 1999:242). Keluarga terdiri dari pribadi- pribadi, tetapi merupakan bagian dari jaringan sosial yang lebih besar. Lembaga keluarga mempunyai fungsi mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat seperti melanjutkan keturunan atau reproduksi, afeksi dan sosialisasi. Selain itu juga keluarga merupakn satu kesatuan sosial yang paling dasar dan terkecil dalam masyarakat. Keluarga hanya terdiri atas dua orang suami dan istri atau ditambah dengan kehadiran anak-anak,baik yang dilahirkan maupun yang diadopsi. Setelah sebuah keluarga terbentuk, anggota keluarga yang ada didalamnya memiliki tugas masing-masing. Suatu pekerajaan yang harus dilakukan dalam kehidupan keluarga inilah yang disebut fungsi. Jadi fungsi keluarga adalah suatu pekerjaan atau tugas di dalam atau di luar keluarga. (Abu Ahmadi,1991 : 88).

d). Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial adalah semua orang/manusia yang mempengaruhi kita, pengaruh linkungan sosial itu ada yang kita teriima secara langsung dan ada yang tidak langsung. Pengaruh secara langsung seperti dalam pergaulan sehari-hari dengan orang lain, dengan keluarga kita, teman-teman kita, kawan sekolah, kawan sepekerjaan, dan sebagainya. Sedangkan cara tidak langsung dapat melalui radio dan televisi, dengan membaca buku-buku dan majalah, surat kabar, dan denggan berbagai cara lainnya. Masing-masing dari kita, terutama dalam hal kepribadian kita adalah hasil dari interaksi gen-gen dan lingkungan sosoial, karena interaksi ini maka tiap orang adalah unik, tiap orang memiliki kepribadian sendiri-sendiri yang berbeda-beda satu ama lain.

Jika kita hubungkan antara pembawaan/keturunan dan lingkungan dalam hal pengaruhnya terhadap perkembangan manusia, dapat dikatakan sebagai berikut, sifat-sifat dan watak kita adalah hasil dari interaksi antara pembawaan dan lingkungan. Dalam hal ini pengertian harus ditekankan pada kata interaksi interaksi antara keduanya akan menentukan bagaimana hasil/keadaan perkembangan aspek-aspek tertentu dari manusia ( M.Daliyono,1997:134-137).

Kauma (2002: 29-30) mengemukakan beberapa sebab yang menjadikan anak remaja baik remaja putra maupun putri melakukan penyimpangan seksual, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kemampuan remaja untuk mengontrol dan mengendalikan diri, terutama emosi-emosinya. Hal ini membuat remaja melakukan hal-hal yang negatif diantaranya hubungan seks bebas tanpa disertai berpikir panjang apa dampak yang ditimbulkan untuk masa depannya.
2. Adanya ketidakstabilan psikis. Karena jiwanya yang masih belum mampu mengendalikan emosinya, maka hal ini mudah saja menjerumuskan remaja dalam melakukan perbuatan negatif.
3. Adanya konflik-konflik intern yang sangat kuat. Hal ini dilakukan oleh para remaja sebagai pelampiasan dirinya dari segala problem yang sedang menghimpit jiwanya.
4. Adanya kebimbangan pada dirinya yang merasa belum pernah menemukan norma yang mantap yang bisa dijadikan pegangan hidup, sehingga ia melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma susila dan agama.
5. **Dampak Sosial Prostitusi**

Kehadiran prostitusi di masyarakat dapat memberikan dampak yang dapat memicu perubahan sosial. menurut Kartini Kartono (2013: 249) dampak sosial yang ditimbulkan oleh adanya prostitusi antara lain:

1. Menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit kelamin dan kulit.

Adapun penyakit yang ditimbulkan dari perilaku prostitusi ini ialah HIV/AIDS, HIV/AIDS sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Agar virus ini tidak merambat terlalu jauh perlu adanya pencegahan yaitu dengan mempersempit jaringan prostitusi ini. Sebab dengan luasnya jaringan prostitusi, akan semakin mempermudah penyebaran penyakit kelamin yang dapat menular melalui hubungan seksual.

1. Merusak kehidupan keluarga

Dengan adanya wanita tuna susila akan mengakibatkan sendi-sendi dalam keluarga rusak. Semakin banyak pengguna jasa akan semakin memperbanyak jumlah WTS ini, dan akan menular ke masyarakat luas. Keluarga yang awalnya harmonis bisa hancur karena kepala rumah tangga mencari jasa PSK.

1. Mendemoralisasi atau memberikan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan kususnya anak-anak muda dan remaja pada masa puber dan adolesensi.
2. Berkorelasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkotika dan minuman keras. Prostitusi sangat berkaitan erat dengan minuman keras dan narkotika. Minuman keras dan narkotika akan digunakan sebagai doping dalam hubungan seksual. Hal ini mudah dijumpai di bar atau cafe. Di lokasi tersebut selain sebagai tempat untuk menjual minuman keras, juga digunakan sebagai tempat transaksi narkoba.
3. Merusak sendi-sendi moral, susila, hukum dan agama.

Dengan meluasnya prostitusi akan merusak nilai moral, susila, hukum dan agama. Karena pada dasarnya prostitusi bertentangan dengan norma moral, susila, hukum dan agama. Rusaknya nilai dan moral membuat tatanan masyarakat berantakan. Sehingga nilai dan norma moral, susila, hukum dan agama harus ditanamkan pada masyarakat sedini mungkin.

1. **Penanggulangan Prostitusi**

Pada garis besarnya, usaha untuk mengatasi masalah tunasusila ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu : Usaha yang bersifat preventif serta Tindakan yang bersifat represif dan kuratif. Adapun usaha-usaha yang bersifat *preventif* diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya pelacuran. Usaha ini antara lain berupa :

1. Penyempurnaan perundang-undangan mengenai larangan atau penyelenggaraan pelacuran
2. Intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian
3. Menciptakan bermacam-macam kesibukan dan kesempatan rekreasi
4. Memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita, disesuaikan dengan kodrat dan bakatnya
5. Penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam kehidupan keluarga
6. Pembentukan badan atau tim koordinasi dari semua usaha penanggulangan pelacuran yang dilakukan oleh beberapa instansi sekaligus mengikutsertakan potensi masyarakat local
7. Penyitaan terhadap buku-buku dan majalah-majalah cabul, gambar-gambar porno, film-film biru serta sarana-sarana lainnya yang merangsang nafsu seks
8. Meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya

Sedangkan, usaha yang *represif* dan *kuratif* dimaksudkan sebagai kegiatan untuk menekan (menghapuskan, menindas) dan usaha menyembuhkan para wanita dari ketunasusilaan untuk kemudian membawa mereka ke jalan yang benar. Usaha represif dan kuratif ini antara lain berupa :

1. Melalui lokalisasi yang sering ditafsirkan sebagai legalisasi, orang melakukan pengawasan/kontrol yang ketat
2. Diusahakan melalui aktivitas rehabilitas dan resosialisasi, agar mereka bisa dikembalikan sebagai warga masyarakat yang susila
3. Penyempurnaan tempat-tempat penampungan bagi para wanita tunasusila yang terkena razia
4. Pemberian suntikan dan pengobatan pada interval waktu tetap
5. Menyediakan lapangan kerja baru
6. Mengadakan pendekatan terhadap pihak keluarga para pelacur dan masyarakat asal mereka mau menerima kembali bekas-bekas wanita tunasusila itu
7. Mencari pasangan hidup yang permanen/suami bagi para wanita tunasusila
8. Mengikutsertakan ex-WTS (bekas wanita tuna susila) dalam usaha transmigrasi dalam rangka pemerataan penduduk di tanah air, dan perluasan kesempatan kerja bagi kaum wanita.
9. **Beberapa Penyebab Timbulnya Pelacuran**

Berlangsungnya perubahan sosial yang serba cepat dan perkembangan yang tidak sama dalam kebudayaan, mengakibatkan ketidakmampuan banyakindividu untuk menyesuaikan diri, mengakibatkan disharmoni, konflik-konflik eksternal dan internal. Juga disorganisasi sosial dalam masyarakat dan dalam diri pribadi. Peristiwa tersebut memudahkan individu memudahkan pola-pola reaksi yang menyimpang atau inkonvensional dari pola-pola yang berlaku.

Beberapa peristiwa sosial penyebab timbulnya pelacuran antara lain sebagai berikut:

1. Tidak adanya undang-undang yang melarang pelacura. Juga tidak ada larangan bagi orang untuk melakukan relasi seks sebelum pernikahan atau di luar pernikahan.
2. Adanya keinginan dan dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks, khususnya di luar ikatan pernikahan.
3. Komersialisasi dari seks, baik dari pihak wanita maupun germo-germo dan oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan pelayanan seks. Jadi seks, digunakan sebagai alat jamak guna pelayanan seks untuk tujuan komersialisasi di luar pernikahan.
4. Dekadensi moral, merosotnya nilai-nilai susila dan keagamaan pada saat orang mengenya kesejahteraan hidup dan ada penukarbalikan nilai-nilai pernikahan sejati.
5. Semakin besarnya penghinaan terhadap kaum wanita dan harkat manusia.
6. Kebudayaan eksploitasi terhadap kaum wanita pada zaman modern saat ini.
7. Ekonomi, *laissez*-*faire* atau cara bertahan hidup.

Adapun motif-motif yang melatar belakangi terjadinya pelacuran menurut Kartini (2005:244) sebagai berikut:

1. Adanya kecenderungan diri untuk melacurkan diri pada banyak wanita karena untuk menghidndarkan diri dari kesulitan hidup. Dan mendapatkan kesenangan melalui jalan pendek, kurang pengertian, kurang pendidikan, dan buta hurup sehingga menghalalkan pelacuran.
2. Ada napsu yang abnormal sehingga tidak terintegrasi dalam kepribadian dan keroyalan seks. Seks dan hyperseks, sehingga tidak merasa puas mengadakan relasi seks dengan pria satu.
3. Tekanan ekonomi, faktor kemiskinan, ada pertimbangan-pertimbangan ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Khususnya dalam usaha mendapatkan status sosial yang lebih baik.
4. Aspirasi materil yang tinggi pada diri wanita, atau kehidupan mewah yang selalu dilakukan dengan pakaian yang indah dan perhiasan yang mewah.
5. Oleh bujuk rayu kaum laki-laki dan para calo yang menjanjikan pekerjaan yang terhormat dengan gaji tinggi misalnyasebagai pelayan toko, bintang film dan lain-lain. Namun pada akhirnya, gadis-gadis tersebut dengan kejamnya dijebloskan kedalam bordil-bordil dan rumah pelacuran.
6. Disorganisasi dan disentegrasi dari kehidupan keluarga, *broken home* atau ayah dan ibu kawin lagi dengan orang lain. Sehingga anak gadis merasa sangat sengsara bathinnya, tidak bahagia, memberontak, lalu menghibur diri terjun dalam dunia pelacuran.
7. Adanya ambisi-ambisi wanita yang sangat tinggi untuk mendapatkan status sosial yang tinggi dengan jalan yang mudah tanpa kerja berat, tanpa suatu skill atau keterampilan khusus.

Kemudian daripada itu ada 3 tahapan prostitusi menurut Sigmund freud dalam penelitiannya terhadap psikologi seks yaitu:

1. Tahap pertama adalah *libido sexualis*

Tahap libido sexualis artinya adalah cara atau mekanisme yang digunakan untuk mengadakan keturunan (Kartini Kartono, 221). Kemudian dalam tahapan ini memiliki dua bentuk yaitu:

1. Prostitusi Sebagai Daya *Sexualisme*

Prostitusi sebagai daya *sexualisme* adalah sebuah proses dalam mengatur daya seksualitas seorang individu kepada individu yang lainnya, napsunya terlalu tinggi. Maksudnya prostitusi tersebut dilakukan secara berpindah-pindah, kalau dalam hubungan sex dia tidak puas terhadap satu orang maka dia akan berpindJah pada orang lain. Jenis prostitusi biasanya disebut sebagai poligami.

1. Prostiusi Sebagai *Neurotik*

Adalah sebuah perlawanan seks yang dilakukan kepada orang lain karna keinginannya tidak dapat mencapai kepuasan, hal ini dipandang sebagai suatu kejahatan (Pemerkosaan).

b. Tahap kedua adalah Konstruksi Ekonomi

Konstruksi ekonomi adalah cara-cara yang digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi (Mulia, T.S.G, ensiklopedia indonesia, 1947 : 161).

c. Tahap ketiga adalah *Sexual Behavior*

*Sexual* *Behavior* adalah cara yang digunakan dalam mencari kemewahan, kemegahan, dan kesempurnaan hidup, dengan mengubarkan sexualnya sebagai alat untuk mencapainya (Divana, 2003), tahap ketiga ini gaya atau prilaku yang sering dilakukan oleh para artis atau selebritis (Malenowski, psikologi seks, 2008 : 35).

**D.Jenis Pelacuran dan lokalisasi**

Jenis prostitusi dapat dibagi menurut aktifitasnya yaitu terdaftar dan terorganisasi, dan yang tidak terdaftar.

1. Prostitusi yang terdaftar

Pelakunya diawasi olehvice Control dari kepolisian, yang dibantu dan bekerja sama dengan jawatan sosial dan jawatan kesehatan.pada umumnya mereka dilokalisasi pada daerah tertentu. Penghuninya secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan dan mendapatkan suntikan serta pengobatan, sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum.

1. Prostitusi yang tidak terdaftar

Termasuk dalam kelompok ini ialah mereka yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun dalam kelompok. Perbuatannya tidak terorganisasi dan tempatnyapun tidak tertentu. Artinya bisa dilakukan disembarangan tempat. Baik mencari mangsa sendiri maupun melalui calo-calo dan panggilan.

Adapun menurut jumlahnya prostitue dapat dibagi dalam:

1. Prostitusi yang beroperasi secara individual merupakan *single operator* atau;
2. Prostitue yang bekerja dengan bantuan dari organisasi dan sindikat yang teratur rapi. Jadi, mereka itu tidak bekerja sendirian, akan tetapi mereka diatur melalui sistem kerja suatu organisasi.

Sedangkan menurut tempat penggolongan atau lokalisasinya, prostitusi dapat terbagi menjadi:

1. Segregasi atau lokalisasi, yang terisolasi atau terpisah dari kompleks penduduk lainnya. Kompleks ini dikenal sebagai daerah lampu merah, atau petak-petak daerah tertutup;
2. Rumah-rumah panggilan (call Houses, tempat rendezvous, parlour);

Dibalik front organisasi atau di balik bisnis-bisnis, terhormat.(apotik, salon kecantikan, rumah makan, tempat mandi uap dan pijat, anak wayang, sirkus dan lain-lain.

**E.Landasan Teori**

Dalam menjawab permasalahan yang terjadi di panti pijat D’Top, untuk itu, sebagai abahan analisisnya menggunakan teori integrasi sosial Emile Durkheim (Ahmadin, 2013:47). Di mana dalam teori integrasi sosial menurut Durkheim menggambarkan bahwa:

Prostitusi atau *free sex* sebagai perilaku menyimpang yang diletakkan dalam bingkai telaah teori integrasi sosial ala Durkheim. Dengan demikian penjelasan yang muncul adalah “semakin tinggi derajat diferensiasi struktural dan generalisasi nilai tanpa diikuti oleh spesialisasi norma yang sama derajatnya dalam suatu sistem sosial, maka semakin besar pula derajat anomi sehingga semakin tinggi tingkat penyimpangan dalam kelempok tersebut.

seperti yang digambarkan oleh Durkheim di atas bahwa adanya differensiasi struktural tanpa diikuti spesialisasi norma mengakibatkan terjadinya perilaku menyimpang. differensiasi dan struktural dapat di pahami bahwa:

Menurut Durkheim, orang mempunyai keterikatan tertentu dalam dunia sosial, baik terhadap kelompok-kelompok mereka, dalam tatanan lembaga sosial atau organisasi sosial, yang disebutnya sebagai integrasi sosial. Dalam integrasi sosial Durkheim (1983:119) melihat Tingkat integrasi sosial yang secara abnormal tinggi atau rendah dapat menghasilkan bertambahnya tingkat kriminalitas atau perilaku-prilaku yang di anggap menyimpang.

1. Differensiasi sosial, merupakan suatu konsep perkembangan masyarakat modern yang melahirkan pembagian kerja yang tinggi. Sementara struktur adalah wadah atau tempat berlangsungnya perkembangan differensiasi baik dalam suatu organisasi, lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan. Adanya pembagian kerja yang tinggi menyebabkan terjadinya gesekan-gesekan pada suatu sistem sosial atau tatanan sosial yang ada. Dengan terbentuknya suatu pembagian kerja yang tinggi pada masyarakat modern atau kota, di sertai dengan adanya kemampuan khusus Spesialisasi khusus menjadikan sifat-sifat masyarakat yang terbentuk menjadi individualisme yang tercakup dalam solidaritas mekanik. Di mana pembagian kerja yang kompleks di ukur dengan sepesialisasi kerja yang berbeda-beda berdasarkan syarat, keriteria, status sosial, berupa skill atau kemampuan khusus. Adanya spesialisasi kerja yang berbeda-beda dalam bidang pekerjaan sehingga dalam tatanan sosial atau dunia kerja menjadikan individu saling ketergantungan dan mengikat sesamanya. Sehingga dengan begitu individu tidak akan bisa bertahan hidup sendiri tanpa adanya bantuan orang lain. Dengan demikian, adanya differensiasi atau pembagian kerja yang tinggi dengan karakter norma dan nilai yang berkembang menjadikan kehidupan pada masyarakat kota semakin sulit karena tingginya tingkat persaingan yang semakin tinggi, maka skill atau kemampuan yang harus dimiliki juga harus semakin tinggi, dengan begitu tingkat keseimbangan masyarakat akan dapat terwujud manakala differensiasi dapat di ikuti oleh spesialisasi norma yang khusus. Namun sebaliknya apabila perkembangan differensiasi atau pembagian kerja yang tinggi tidak diikuti oleh norma yang bisa mengikat masyarakat dalam setiap tindakannya akan melahirkan perilaku menyimpang seperti yang tertuang dalam konsep anomi dalam hal ini seperti pelacuran di panti pijat D’Top.

Kajian tentang diferensiasi struktural didasarkan pada pandangan Emile Durkheim. Dalam bukunya *Soicide* (1897-1951) Durkheim berpendapat bahwa bila ia dapat menghubungkan perilaku individu seperti bunuh diri itu dengan sebab-sebab sosial atau fakta social (baca: <https://saripuddin.wordpress.com/pemikiran-emile-durkheim/> dikutip tanggal 23 Juni 2016). Lebih lanjut Durkheim berargumen bahwa sifat dan perubahan fakta sosiallah yang menyebabkan perbedaan rata-rata bunuh diri. Contohnya perang, depresi ekonomi dapat menciptakan perasaan depresi kolektif dapat meningkatkan angka bunuh diri. Durkheim membedakan fakta sosial kedalam dua tipe, yaitu fakta material dan fakta non material. Contoh fakta sosial material seperti birokrasi dan hukum. Faktor non material seperti kultur dan institusi sosial. Ia menyimpulkan bahwa masyarakat primitif dipersatukan oleh fakta sosial nonmaterial, khususnya oleh ikatan moralitas bersama atau kesadaran kolektif.

Dalam masyarakat modern ikatan dibangun melalui pembagian kerja yang ruwet, yang mengikat orang satu dengan lainnya dalam hubungan saling tergantung. Pembagian kerja pada masyarakat modern menimbukan beberapa patologis. Durkheim memusatkan perhatian pada fakta sosial nonmaterial yakni agama. Temuannya bahwa sumber agama adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang menetukan bahwa sesuatu itu sakral dan lainnya bersifat profan. Khususnya totemisme. Durkheim menyimpulkan masyrakat dan agama adalah sama. Agama adalah cara masyarakat memperlihatkan dirinya sendiri dalam bentuk fakta sosial nonmaterial. Durkheim seorang reformis yang mencari cara untuk mencari cara untuk meningkatkan fungsi masyarakat.

Emile Durkheim berpandangan bahwa struktur sosial itu terdiri dari norma-norma dan nilai-nilai dan melalui sosialisasi. Melalui proses ini yang membuat anggota-anggota masyarakat menjalankan kehidupan sosial mereka (sumber: <http://abdulghofursparatise.blogspot.co.id/2012/10/konsep-pemikiran-emile-durkheim.html> diakses tanggal 23 Juni 2016). Bagi Durkheim, walaupun kita mungkin menganggap dapat memilih perilaku tertentu untuk berinteraksi dengan orang lain, dalam realitasnya pilihan sebenarnya sudah disediakan oleh sistem nilai dan sistem norma untuk kita.

Durkheim mengungkapkan bahwa pencapaian kehidupan sosial manusia dan eksistensi keteraturan sosial dalam masyarakat yang disebut solidaritas sosial, dimantapkan oleh sosialisasi, yang melalui proses tersebut manusia secara kolektif belajar standar-standar atau aturan-aturan perilaku. Dalam masyarakat yang kuat dan tertib, kebebasan individual hanya dapat terjadi apabila keyakinan dan perilaku diatur dengan sebaik-baiknya melalui sosialisasi. Individu patuh kepada masyarakat dan kepatuhan ini adalah kondisi bagi kebebasannya. Bagi manusia, kebebasan berarti terbebas dari pemaksaan fisik yang membabi-buta, kondisi ini dicapai dengan mematuhi kekuatan besar dan cerdas, yakni masyarakat yang dibawah pengaturannya individu berlindung.

**F.Konsep Tindakan Sosial (Max Weber, 1968).**

Bagi Weber, dunia terwujud karena tindakan sosial. Manusia melakukan sesuatu karena mereka memutuskan untuk melakukannya dan ditujukan untuk mencapai apa yang mereka inginkan/kehendaki. Setelah memilih sasaran, mereka memperhitungkan keadaan, kemudian *memilih* tindakan. Sosiolog juga manusia, mengapresiasi lingkungan sosial di mana mereka berada, memperhatikan tujuan-tujuan warga masyarakat yang bersangkutan dan oleh sebab itu berupaya memahami tindakan mereka.

Perhatian Webber pada teori-teori tindakan berorientasi tujuan dan motivasi pelaku, tidak berarti bahwa ia hanya tertarik pada kelompok kecil, dalam hal ini interaksi spesifik antar individu. Berbeda dengan Marx dan Durkheim yang memandang tugas mereka adalah mengungkapkankecenderungan-kecenderungan dalam kehidupan sosial manusia dan lebih mengarah pada fungsionalisme dalam kehidupan masyarakat. Weber tidak sejalan dengan pandangan tersebut.

Namun sama halnya dengan Marx, Weber juga memperhatikan lintasan besar sejarah dan perubahan sosial. Dan yakin bahwa cara terbaik untuk memahami berbagai masyarakat adalah menghargai bentuk-bentuk tipikal tindakan yang menjadi ciri khasnya.

Weber berpendapat bahwa anda bisa membandingkan struktur beberapa masyarakat dengan memahami alasan-alasan mengapa warga masyarakat tersebut bertindak, kejadian historis (masa lalu) yang memengaruhi karakter mereka, dan memahami tindakan para pelakunya yang hidup di masa kini, tetapi tidak mungkin menggeneralisasi semua masyarakat atau semua struktur sosial.

Weber memusatkan perhatiannya pada tindakan yang jelas-jelas melibatkan campur tangan proses pemikiran (dan tindakan bermakna yang ditimbulkan olehnya) antara terjadinya stimulus(pemacu, penggerak) dengan respon (reaksi). Baginya tugas analisis sosiologi terdiri dari “penafsiran tindakan menurut makna subjektifnya” (Weber, 1921/1968: 8).

Dalam teori tindakannya, tujuan Weber tak lain adalah memfokuskan perhatian pada individu, pola dan regularitas tindakan, dan bukan pada kolektivitas. Tindakan dalam pengertian orientasi perilaku yang dapat dipahami secara subjektif hanya hadir sebagai perilaku seorang atau beberapa orang manusia *individual”* (Weber, 1921/1968: 8).

Adapun menurut Weber bahwa tindakan sosial terbagi menjadi 4 tipe tindakan, di mana Weber menggunakan metodologi tipe idealnya untuk menjelaskan makna ***tindakan,*** dan mengklasifikasinya menjadi empat tipe tindakan dasar, yang dibedakan dalam konteks motif para pelakunya:

1. Tindakan Rasionalitas Sarana-Tujuan/Instrumental, beroreintasi tujuan/penggunaan. Tindakan yang ditentukan oleh harapan terhadap perilaku objek dalam lingkungan dan perilaku manusia lain; harapan-harapan ini digunakan sebagai ‘syarat’ atau ‘sarana’ untuk mencapai tujuan-tujuan aktor lewat upaya dan perhitungan yang rasional” (Weber, 1921/1968: 24). Contoh , Tindakan ini paling efisien untuk mencapai tujuan ini, dan inilah cara terbaik untuk mencapainya.
2. Tindakan Rasionalitas Nilai (berorientasi nilai)

Tindakan “yang ditentukan oleh keyakinan penuh kesadaran akan nilai perilaku-perilaku etis, estetis, religius atau bentuk perilaku lain, yang terlepas dari prospek keberhasilannya” (Weber, 1921/1968;24-25).

3. Tindakan Afektif

Tindakan yang ditentukan oleh kondisi emosi aktor. Tindakan ini hanya mendapat sedikit perhatian dari Weber.

Contoh : *Apa boleh buat maka saya lakukan.*

4. Tindakan Tradisional

Tindakan yang ditentukan oleh cara bertindak aktor yang sudah terbiasa dan lazim dilakukan. Contoh, Saya melakukan ini karena saya selalu melakukannya.

**E.Kerangka Konseptual**

Berdasarkan kajian teori yang telah dilakukan, maka dapat dibangun satu kerangka konseptual yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun kerangka konsptual dari penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut.

Secara umum fungsi Panti Pijat yang sesungguhnya termasuk panji pijat D.Top yang ada di Jalan Mirah Seruni Kecematan Penakukang Kota Makassar seperti yang dijelaskan dalam peraturan pemerintah kebudayaan dan pariwisatan dan peraturan daerah Kota Makassar No 5 tahun 2011 merupakan tempat rekreasi bagi masyarakat setempat untuk melepas lelah setelah melakukan berbagai aktivitas. Namun yang terjadi sebaliknya Panti Pijat D’Top justru dijadikan tempat prostitusi, meskipun hal ini dilakukan secara sembuyi dan tertutup. Akan tetapi, kalau dicermati secara mendalam dan teliti Panti Pijat D’Top sarat dengan praktek-praktek perilaku menyimpang.

Beberapa kali pihak keamana Polisi dan Sat Pol Pp Kota Makassar melakukan razia ditempat**-**tempat tersebut dan terbukti banyak sekali oknum**-**oknum tertentu yang memanfaatkan fasilitas Panti Pijat D’Top tidak untuk memijat melainkan untuk maksud**-**maksud tertentu yang berhasil diamankan. Kondisi dan keadaan ini tentu akan meresahkan masyarakat setempat. Oleh karena demikian, hal ini perlu diungkap motif dan tujuannya, sehingga fungsi Panti Pijat D’Top yang susungguhnya yang dibenarkan sesuai dengan hukum dan norma kemasyarakatan tetap dapat dipertahankan.

**Bagan 2. 1. Kerangka Konseptual**

**Panti Pijat D.Top**

Peraturan Pemerintah No

PM.90/HK.501/MKP 2010

Peraturan Daerah

Kota Makassar No 5 Thn 2011

Fungsi Panti Pijat

* Tempat hiburan dan rekreasi
* Penyediaan jasa pijat

Tempat Prostitusi

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

1. **Jenis dan Lokasi Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif Danzim dan Lincolin (Moleong, 2007:5) merupakan penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Lebih lanjut Meleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud mengetahui fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, peristiwa, persepsi, motivasi,tindakan dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif fokus dan lokus masalah cenderung melihat masalah tak kentara sebagai fenomena sosial yang ungkapkan maknanya karena berada di kedalaman tersebut (Burhan Bungin, 2007:99). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi kasus. Menurut John W. Creswell (2009:19) Penelitian Studi kasus merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus**-**kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Studi kasus pada intinya adalah meneliti kehidupan satu atau beberapa komunitas, organisasi atau perorangan yang dijadikan unit analisis. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Panti D.Top Jalan Mirah Seruni Kelurahan Pandang Kota Makassar.

1. **Fokus Penelitian dan Informan**

Sesuai dengan judul yang akan diteliti yaitu “Pelacuran di Panti Pijat Studi Kasus Perilaku Seks Menyimpang Panti Pijat Kabugaran jasmani D’Top Kecamatan Panakukkang kota Makassar”. Adapun penelitian ini dilaksanakan di Makassar yang di fokuskan pada Panti Pijat D’Top Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, terutama dalam hal Pelacuran, dengan melihat segala permasalahan yang ada pada panti pijat tersebut.

Karena penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, maka dalam menentukan informan dilakukan secara sengaja (*Purposive Sampling*), dimana *purposive sampling* merupakan tehnik pengambilan sumber data dengan karakteristik tertentu. Penentuan informan dilakukan dengan *purvosive sampling* yaitu menentukan calon informan yang memenuhi ciri-ciri, keriteria sebagai berikut: informan kunci sebanyak 3 orang yaitu 1 orang tokoh pemuda, 1 orang tokoh masyarakat yaitu Bapak Lurah, dan 1 orang dari dinas pariwisata. Dan sebagai informan ahli yaitu 3 orang yang berprofesi sebagai seorang karyawan di Panti pijat D’ top yang berumur 29 tahun sampai 40 tahun.

1. **Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data**

Instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus *divalidasi* seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun kelapangan. Validitas sebagai instrument meliputi validitas terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang akan diteliti. Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya (Bungin, 2007: 115). Observasi sebagai metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data mengenai “Pelacuran di Panti Pijat”, adapun tindakan observasi meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.

Beberapa kriteria dalam observasi antara lain; a. Pengamatan digunakan dalam penelitian dan telah direncanakan secara sistematis, b. Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, c. Pengamatan dicatat dengan sistematik dan dihubungkan dengan proposisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu yang hanya menarik perhatian, d. Pengamatan dapat dicek dan dikontrol mengenai keabsahan data yang diperoleh (Suharsimi Arikunto, 2010:81).

1. Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian. Wawancara *(interview)* dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka *(face to face)* (Suyanto & Sutinah, 2005:69). Tehnik pengumpulan data dengan wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara bertahap, karena karakter utama dari wawancara ini adalah dilakukan secara bertahap. Dengan sistem datang dan pergi dalam wawancara, tindakan ini mempunyai kelebihan dalam mengembangkan objek-objek baru dalam wawancara berikutnya karena pewawancara memperoleh waktu yang panjang diluar informan untuk menganalisis hasil wawancara yang telah dilakukan serta dapat mengoreksinya.

Data yang ingin di dapatkan dari wawancara ini menyangkut bagaimana perilaku pelacuran di Panti Pijat. Selain itu, secara khususnya yang peneliti ingin cari tahu dengan menggunakan wawancara ini adalah menemukan informasi atau kata-kata yang mengenai perilaku pelacuran yang dilakukan. Dalam pencarian informan peneliti akan menggunakan banyak indikator, salah satunya adalah mereka yang secara tidak langsung terlibat dalam nama-nama informan dan kriteria informan yang data bisa di temukan. Sehingga data yang di peroleh betul-betul valid, namun, Pada intinya yang jelas kriteria yang peneliti akan gunakan adalah mereka yang bergelut dalam panti pijat dan memahami keadaan yang terjadi panti pijat D’Top..

1. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian ilmu sosial. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, pada penelitian sejarah, data dokumentasi memang berperan sangat penting (Burhan Bungin, 2008: 121). Dokumentasi dalam hal ini berbentuk data-data, gambar, dan data-data visual jika ada. Namun yang memungkinkan untuk di cari dalam hal ini hanya berupa data dokumen yang berupa arsif-arsif dan gambar-gambar. Data yang ingin di cari dalam bentuk dokumentasi, hususnya dalam penelitian ini terutama sekali menyangkut pelacuran.

**D.Taknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif murni, maksudnya adalah mengidentifikasi, menemukan, dan menafsirkan berbagai temuan-temuan fakta yang terjadi di lapangan.

Analsisi data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Bogdan & Biglen, 1982:132).

Di pihak lain, analisis data kualitatif (Seiddel, 1998:64), prosesnya berjalan sebagai berikut:

1. Mencatat apa yang ditemukan dilapangan, hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesis-kan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya.
3. Berpikir, atau membuat konsep agar kategori data itu mempunyai makna, dan membuat temuan-temuan umum.

Selanjutnya menurut Janice Mcdrury *(collaborative group analisis of data,* 1999:77*)* tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data.
2. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data.
3. Menuliskan model yang ditemukan
4. Koding yang telah dilakukan.

Dari defenisi-defenisi tersebut dapatlah dipahami bahwa ada yang mengemukakan proses, ada pula yang menjelaskan tentang komponen-komponen yang perlu ada dalam suatu analisis data (Bogdan, 2010: 248).

Tahapan penelitian kualitatif juga adalah tahapan analisis kualitatif, dengan demikian, maka tahapan-tahapan analisis itu juga adalah yang dilaksanakan peneliti pada setiap tahapan penelitiannya. Jadi, model langkah analisis data kualitatif bukanlah teknik analisis data kualitatif melainkan sebuah setrategi analisis data yang melekat pada setiap tahapan langkah penelitian kualitatif, sedangkan metode atau teknik analisis kualitatif adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data beberapa alat hanya untuk pengumpulan data dan sekaligus juga adalah alat analisis data (Soejono Soekanto, 1992:113).

Hasil analisis ini selanjutnya di deskripsikan atau digambarkan sesuai dengan masalah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian. Untuk lebih jelasnya gambaran tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

1. Reduksi data (*Data Reduction*) melakukan analisis data dengan cara merumuskan, memilah memilih hal-hal pokok yang relevan, menfokuskan pada hal-hal penting, dan membuat kategorisasi sehingga memberikan gambaran yang jelas serta mempermudah peneliti dalam menganalisis data. Selanjutnya, langkah-langkah yang dilakukan adalah; a. Informasi wawancara yang diperoleh dari sejumlah informan dicatat dan dituangkan dalam bentuk tabulasi data, b. Data yang telah dicatat dan ditabulasi, diseleksi sehingga yang diambil hanya yang dianggap paling representative untuk disajikan sebagai data
2. Penyajian data (*Display Data*) mengorganisasikan data, membuat kedalam pola, membuat uraian singkat bagan, hubungsan antra kategori, langkah-langkah yang dilakukan adalah; a. data yang telah diseleksi di internalisasikan dan direlevansikan dengan data etik, b. informasi yang diperoleh dari wawancara di interprestasikan untuk memberikan gambaran mendeskrifsikan fokus-fokus masalah.
3. *Conclusion Drawing/Verivication*. Penarikan kesimpulan setelah menyajikan data. Peneliti akan menarik sebuah kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dan memberikan saran-saran berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulam yang diambil. Langkah-langkah yang dilakukan adalah: a. Mendeskripsiskan fokus masalah yang telah di interperetasi dan dilakukan penarikan kesimpulan, b. Kesimpulan sementara direlevansikan dengan hasil observasi lapangan, sehingga memperolah pemahaman masalah yang sesuai dengan kajian teoritis. c. Melakukan penyimpulan akhir dan mendes-kripsikan sebagai hasil penelitian.

**E.Teknik Keabsahan Data**

Menurut Sugiyono (2011:116), mengemukakan bahwa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas) dan *confirmability* (objektivitas). Berdasarkan keempat syarat tersebut, uji keabsahan data dalam penelitian selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Validitas internal (*credibility*), yaitu ukuran kebenaran data yang dikumpulkan menggambarkan kecocokan konsep peneliti dengan hasil penelitian. Oleh karena itu, peneliti melakukan:
2. Perpanjangan pengamatan (*prolonged engagement*), yaitu turun ke lapangan mengecek kebenaran data yang telah diperoleh. Bila data yang didapat sudah benar maka waktu perpanjangan dapat diakhiri.
3. Meningkatkan ketekunan (*persistent observation*) yaitu melakukan pengamatan secara berulang dan berkesinambungan pada berbagai objek lokasi penelitian.
4. Validitas eksternal (*keteralihan/transferability*), pembuktian hasil penelitian apakah bisa digeneralisasikan pada setting sosial yang berbeda tetapi mempunyai karakteristik yang sama.
5. Kebergantungan (*dependability/reliabilitas*), di mana hasil penelitian merupakan refresentasi dari rangkaian kegiatan pencarian data yang dapat ditelusuri jejaknya. Oleh karena itu, audit komisi pembimbing atas proses penelitian, mulai dari penentuan masalah, memasuki lapangan, menentukan sumber data, serta penarikan kesimpulan merupakan ukuran reliabilitas proses penelitian.
6. Kepastian/objektivitas (*confirmability*), dilakukan bersamaan dengan depen-dability, untuk menguji keterkaitan hasil dan proses penelitian.
7. Triangaulasi yaitu mengeek kebsahan data dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai sumber informasi. Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dengan hasil wawancara informan yang berbeda tetapi dapat dipadukan jawaban atara data primer dan data skundernya mengenai pelacuran di pantai pijat.

**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

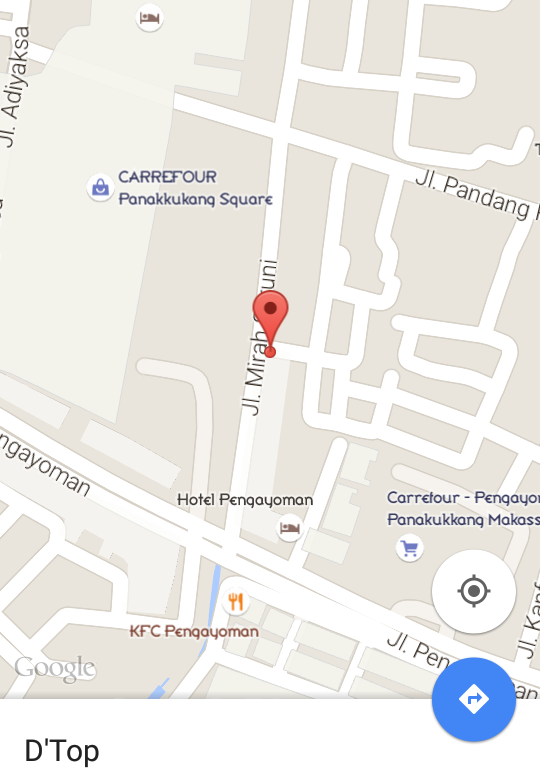
1. **Deskripsi Hasil Analisis Data**

Deskripsi hasil analisis data diawali dengan pemaparan data tentang gambaran umum latar penelitian. Adapun latar penelitian yang dideskripsikan adalah berkaitan dengan gambaran umum Panti Pijat D’Top Penakkukang Kota Makassar, kemudian dilanjutkan dengan deskripsi data hasil penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian, yang terdiri dari: Faktor yang melatarbelakangi perubahan fungsi Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar, peran pemerintah dalam mencegah terjadinya penyimpangan di Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar, dan implikasi sosial dari perilaku menyimpang di Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar.

1. **Gambaran Umum Latar Penelitian**

Panti Pijat D’Top merupakan salah satu panti pijat yang ada di Kecamatan Penakukang kota Makassar terletak di Jl. Mirah Seruni No.23, Pandang, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan terletak diantara dua panti pijat yaitu disebelah kanannya terdapat D star dan di sebelah kirinya yaitu panti pijat seruni. Dalam panti pijat D’Top ini terdiri dari tiga lantai yaitu lantai pertama adalah tempat kasir dan tempat karyawan beristirahat menunggu pelanggan yang akan memakai jasanya, dilantai pertama inilah pengunjung dihadapkan dengan berjejernya poto karyawan dengan penampilan sexi yang ditandai dengan simbol koin di atas poto tersebut. Dimana koin yang berwarna merah menandakan karyawan yang di poto sudah dipakai jasanya atau sedang melayani pengunjung. Sedangkan koin yang berwarna kuning menandakan karyawan yang siap melayani pengunjung. Setelah kita memilih koin yang berwarna kuning kita disarankan untuk membayar sebanyak 75 ribu, adapun lantai yang kedua terdapat kamar yang berhadap-hadapan dengan kamar yang tertutup rapat dan memang didesain untuk melakukan prostitusi dan diterangi dengan lampu yang redup dan suara musik yang kerasagar tidak terdengar oleh orang lain pada saat melakukan penawaran seks bagi pengunjung. Sedangkan lantai ketiga yaitu tempat mes atau tempat tinggal karyawan sehingga karyawan tersebut tidak lagi kos atau tinggal di tempat lain di luar panti pijat d’Top.

51



*Sumber: Google Maps, 28 April 2016*

Di samping Panti Pijat D’Top masih ada panti pijat yang lain yang beroperasi di Kecamatan penakkukang Kota Makassar. Berikut daftar nama-nama panti pijat yang ada di Kecamatan Penakukang kota Makassar serta nama-nama pemiliknya.

Tabel 4.1 : Nama-Nama Panti pijat Kecamatan Panakkukang Kota Makassar

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Panti Pijat | Alamat | Pemilik | Jumlah  Kamar |
| 1 | Sriwijaya mulya | Jl. Pengayoman Ruko alfa 21 | Purwati | 22 |
| 2 | Ladys | Jl. Toddopuli Raya B.H3/3 | Asrudhy Rusdin | 10 |
| 3 | Lotus | Jl. Boulevard Roku Topaz B7/53 | Asrudhy Rusdin | 10 |
| 4 | Kartika | Jl. Boulevard Jasper 1/22 | Eddi Lie | 13 |
| 5 | Indah Raya | Jl. Toddopuli Raya B.C1/11 | Djarmin Armiati | 6 |
| 6 | Family Refleksi | Jl. Pandang Raya Ruko Saphire 3-4 | Edi Sutaryo | 16 |
| 7 | D’Top | Jl. Mira Seruni No.23 | Ir. Faysal YS | 12 |
| 8 | D’Star | Jl. Mira Seruni No.23 | Ir. Faysal YS | 20 |
| 9 | Seruni Margaret | Jl. Mira Seruni 21 | 1. Pattiroi | 10 |
| 10 | Valentine | Jl. Toddopuli Raya Blok B No.1-2 | Ajis Kalla | 12 |
| 11 | Metro shiatzu | Jl. Pengayoman Ruko Alfa No. 17 | Hengky Pidono | 22 |
| 12 | Sehat Segar | Jl. Boulevard Komp. Jascinth | Sheila Liman | 12 |
| 13 | MDJ Refleksi | Jl. Pelita Raya 1 | Mauren F S | 5 |
| Jumlah | | | | 150 |

1. **Faktor Yang Melatarbelakangi Perubahan Fungsi Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar**

Pada bagian ini akan dideskripsikan data hasil penelitian yang berkaitan dengan faktor yang melatarbelakangi perubahan fungsi Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar. Dengan demikian, data yang berkaitan dengan faktor yang melatarbelakangi perubahan fungsi Panti Pijat diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan informan para pekerja yang ada di Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar.

Dalam pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, sering kali karyawan yang berada di panti pijat D’Top sering kali mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari pemilik panti pijat. Di mana dalam hal tersebut dapat ditemukan dalam bagaimana pembagian hasil yang diperoleh oleh karyawan sangat tidak sebanding dengan apa yang dilakukan mengenai jasa pemijatan yang diberikan kepada pengunjung. Pemilik panti pijat memberikan gaji atau upah yang sangat minim terhadap karyawanyya sehingga seringkali karyawan merasa tidak mendapatkan keadilan dari apa yang sudah dilakukan dari pemilik panti pijat, sementara kebutuhan hidup karyawan yang banyak tidak bisa terpenuhi. Dalam kehidupan atau keadaan di Panti Pijat D’ Top tergambarkan bahwa situasi tersebut menandakan telah terjadinya suatu tindakan eksploitasi oleh pemilik panti pijat atau bos panti pijat terhadap karyawannya. Adapun pada proses pengkretrutman karyawan di Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar, karyawan diterima bekerja di panti pijat tidak berdasarkan pada ketrampilan dan keahlian yang dimiliki. Setiap perempuan boleh bekerja yang penting cantik, sistem gaji para pekerja panti pijat dihitung per-bulan bardasarkan kupon.

Berlanjut dalam pengamatan peneliti bahwa tindakan pelacuran memang telah sengaja dirancang dengan baik oleh pemilik panti pijat kepada karyawan. Setiap pendapatan yang di peroleh oleh karyawan di tulis dalam bentuk kupon, dan Setiap kupon memiliki harga sekitar Rp. 13.000. sehingga uang yang diterima oleh para pekerja diluar dari jasa pijat (untuk Plus-plusnya) diambil oleh para pekerja itu sendiri. Di mana pengunjung yang tidak tahu ada plus-plusnya, pekerja itu sendiri yang akan langsung menawarksan diri. Jika pengunjungnya tahu terlebih dahulu tinggal pengunjung tersebut meminta dan melakukan nego secara langsung dengan pekerja. Kegiatan Pijat plus-plus antara pengunjung dan para pekerja memakai durasi waktu tergantung kesepakatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan pekerja yang ada di Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar ditemukan banyak sekali faktor yang melatarbelakangi perubahan fungsi Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang, yang semula dari tempat pemijatan atau penawaran jasa Pijat biasa kepada para pengunjung menjadi tempat pemijatan plus-plus (tempat berlangsungnya praktek prostitusi). Hal ini terungkap dari hasil wawancara langsung penulis dengan para pekerja yang ada. Mereka memiliki pandangan yang hampir sama tentang berbagai faktor yang melatarbelakangi atau faktor yang memaksa mereka untuk melakukan berbagai praktek prostitusi di Panti Pijat D’Top Kecataman Penakkukan Kota Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang informan yang bernama Abel (umur 29 tahun), perempuan asal Madura yang bekerja sebagai karyawan Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar ditemukan bahwa faktor yang melatarbelakangi mereka melakukan praktek prostitusi atau dengan istilah Pijat Plus-Plus adalah karena faktor keluarga dan kondisi sosial ekonomi, yaitu menyangkut tanggung jawab terhadap keluarga (anak), cerai dengan suaminya, dan ajakan teman sekampung. Sebagaimana terungkap dari kutipan hasil wawancara berikut:

“...iya saya sudah cerai dengan suami saya mas,...saya harus memberi makan anak saya, karena gak ada kerjaan, awalnya saya diajak teman sekampung untuk cari kerja ke makassar, dan akhirnya saya bekerja di sini,...” (wawancara tanggal 10 Januari 2015).

Informan juga menyampaikan tentang berbagai kegiatan atau aktivitas yang berlangsung dan dialami secara langsung oleh pekerja, mulai dari proses penerimaan sampai pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Adapun proses perekrutan mereka menjadi pekerja di Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar tidak dilihat dari ketrampilan dan keahlian yang dimiliki. Setiap perempuan boleh bekerja yang penting cantik, sistem gaji para pekerja panti pijat dihitung per-bulan bardasarkan kupon. Setiap kupon terdiri dari Rp. 13.000. Adapun uang yang diterima oleh para pekerja diluar dari jasa pijat (untuk Plus-plusnya) diambil oleh para pekerja itu sendiri. Sementara pengunjung yang tidak tahu ada plus-plusnya, pekerja itu sendiri yang akan langsung menawarkan diri. Jika pengunjungnya tahu terlebih dahulu tinggal pengunjung tersebut meminta dan melakukan nego secara langsung dengan pekerja. Kegiatan Pijat plus-plus antara pengunjung dan para pekerja memakai durasi waktu tergantung kesepakatan.

Berdasarkan hasil observasi langsung peneliti di lapangan, Panti pijat yang paling ramai di Kecamatan Penakukkang Kota Makassar adalah Panti Pijat D’Top, karena murah dan pekerjanya juga cantik-cantik. Pemiliki panti pijat mengetahui kalau tempat pijatnya juga ada kegiatan prostitusi serta penggunaan obat terlarang sejenis (somadril) dan biasa di sebut somad Obat terlarang berupa *somad* akan disembunyikan ketika ada razia petugas. Obat tersebut digunakan oleh para pengunjung Panti Pijat saat sebelum melakukan hubungan badan (seks). Tarif umum plus-plusnya tergantung nego mulai dari Rp. 50.000 s/d Rp. 500.000.

Menurut pengakuan dari informan, secara umum para pelanggan suka dengan orang jawa, karena orang jawa sopan cara bicaranya dan bagus cara pijatnya serta *service-*nya juga mantab. Semua Panti Pijat yang ada di Kota Makassar ada plus**-**plusnya. Hal ini berdasarkan hasil penggerebekan yang pernah dilakukan oleh pihak kepolisian. Hasil penelitian juga menemukan bahwa pengunjung Panti Pijat D’Top terdapat pelajar SMA dan SMP, yang penting mereka masuk panti pijat tidak menggunakan seragam sekolah. Hasil penggerebekan tersebut, pihak keamanan menahan dua orang pekerja dan pemiliki Panti Pijat, kemudian mengeluarkan uang tebusan sebanyak 20 juta/orang.

Adanya indikasi perilaku seksualitas kalangan para pengunjung panti pijat tidak hanya dari pengakuan para pekerja panti pijat itu sendiri. Tetapi juga diakui oleh pelanggan salah satu pelanggan berinisial AR memaparkan bahwa perilaku seksualitas dalam panti pijat jarang ada orang luar yang mengetahuinya karena sifatnya tersembunyi.perilaku orang-orang di dalamnya sulit sekali untuk diketahui melainkan harus masuk panti pijat. Berikut kutipan wawancaranya:

Sebenarnya saya tidak percaya adanya perilaku seks yang begitu dalam panti pijat, saat teman saya menceritakan kepada saya menceritakan kepada saya. Tetapi setelah saya pergi untuk membuktikannya ternyata benar-benar ada, bahkan saya pernah ditawari untuk begituan tetapi duit saya tidak cukup.karena niatan saya hadir disana bukan untuk gituan….(AR, wawancara, 14 Januari 2016).

Ungkapan informan di atas menjelaskan tentang kepastian adanya perilaku seks terselubung dalam panti pijat. Bahwa ada oknum yang sengaja ingin pergi kepanti pijat bukan hanya untuk pijat melainkan untuk tujuan yang lain. Salah satu informan yang berhasil peneliti wawancarai menjelaskan bahwa orang-orang yang berkunjung kebanyakan bukan pergi untuk pijat melainkan untuk menikmati pelayanan seks. Namun hal tersebut tidak terlalu nampak. Berikut wawancara dengan salah seorang pengunjung panti pijat berinisial SB, mengatakan:

Saya senang sekali dipijat-pijat apalagi karyawan panti pijat ini cantik-cantik makanya mengundang hasrat untuk gituan….(SB adalah seorang anak SMA, data diolah tanggal 28 januari 2016).

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan di atas dan observasi langsung yang dilakukan penulis di lapangan, dapat diketahui bahwa faktor yang melatarbelakangi perubahan fungsi Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar adalah kondisi sosial, budaya dan ekonomi para pekerja. Kondisi sosial ekonomi lebih dominan mempengaruhi sikap dan perilaku individu yang bekerja sebagai penjual jasa Pijat tersebut. Kegiatan Pijat Plus-Plus merupakan langkah “terpaksa” sebagai alternatif dalam menghadapi berbagai tekanan yang ada.

Hal senada juga disampaikan oleh informan atas nama Jihan (26 Tahun) perempuan asal Surabaya yang mengungkapkan bahwa faktor penyebab mereka (pekerja) melakukan praktek prostitusi (Pijat Plus-Plus) di Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar adalah karena mengikuti teman-temannya, dimanfaatkan oleh suaminya, kurang kasih sayang dari suami dan keluarga, korban *broken home*, dan tekanan kebutuhan ekonomi. Sebagaimana terungkap dari penuturan informan berikut:

“,..saya memiliki masalah dengan keluarga saya mas, saya kurang mendapatkan kasih sayang dari suami saya, kami bercerai. Karena tuntutan kebutuhan, akhirnya saya harus mencari kerja, dan satu-satunya jalan saya harus ikut teman saya ke Makassar” (wawancara tanggal 10 Januari 2015).

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa faktor yang melatarbelakangi adanya kegiatan prostitusi dan telah merubah fungsi Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar secara umum dapat dikelompok menjadi tiga faktor, yaitu faktor keluarga, kehidupan sosial, dan ekonomi.

Mengacu pada hasil wawancara dengan informan tersebut dan juga berdasarkan hasil observasi langsung penulis di lapangan, ditemukan bahwa perubahan fungsi Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar lebih dominan dipengaruhi oleh kondisi yang dialami oleh para pekerja atau individu yang bekerja sebagai penawar jasa Pijat yang ada di Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar. Di samping itu ada juga dilatarbelakangi oleh lemahnya aturan yang mengatur tentang jenis kegiatan atau aktivitas yang boleh ada di Panti Pijat D’Top tersebut. Akibat dari lemahnya aturan yang dimaksud, pihak yang berwenang seperti kepolisian dan Pol-PP tidak dapat melakukan kontrol sosial yang ketat.

Sementara itu, Unyu (29 Tahun) perempuan asal Jeneponto juga mengungkapkan faktor lain yang melatarbelakangi tumbuhnya praktek prostitusi (Pijat Plus-Plus) di Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar. Menurut informan ini, yang membuat mereka melakukan praktek Pijat Plus-Plus adalah kurangnya ketrampilan untuk mendapat pekerjaan yang lebih layak. Selain itu yang lebih memprihatinkan adalah karena hubungan asmara yang tidak terkontrol sampai terjebak dalam pergaulan bebas yang berujung pada seks bebas dengan pasangan. Hal ini terungkap dari hasil wawancara dengan informan berikut:

“saya hanya tamat SMA mas,..saya udah berusaha mencari pekerjaan, tetapi peluang saya tidak ada, mungkin karena saya tidak memiliki ketrampilan kali yah,...saya juga ada masalah dengan pacar saya, keperawanan saya direnggut oleh pacara saya mas” (wawancara tanggal 10 Januari 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ketiga di atas, dapat diketahui bahwa praktek prostitusi (Pijat Plus-Plus) yang ada di Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukan Kota Makassar juga dilatarbelakangi oleh rendanya ketrampilan yang dimiliki, disamping yang lebih parah lagi adalah pergaulan bebas dikalangan remaja yang tidak terkontrol atau di luar batas kewajaran. Sehingga sebagai konsekuensinya, mereka kehilangan kesempatan untuk berjuang meraih pekerjaan yang lebih baik selain bekerja sebagai pemijat.

Mengacu pada hasil wawancara mendalam dengan tiga orang informan di atas, dan juga observasi partisipatif yang dilakukan oleh penulis selama mengadakan penelitian di lapangan, dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi perubahan fungsi Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar adalah berawal dari kondisi pribadi yang dialami oleh individu pekerja (karyawan) Panti Pijat itu sendiri. Kondisi pribadi yang dimaksudkan disini adalah berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh masing-masing pekerja, yaitu masalah keluarga, sosial, budaya, dan ekonomi. Dengan hadirnya berbagai masalah tersebut memaksa mereka untuk menentukan pilihan hidup, termasuk menjalankan aktivitas prostitusi atau dalam istilah lain adalah Pijat Plus-Plus. Kondisi demikian telah menjadi dari kehidupan mereka seharai-hari.

1. **Peran Pemerintah dalam Mencegah Terjadinya Penyimpangan Di Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar**

Pada bagian ini dikemukakan berbagai peran pemerintah dalam mencegah terjadinya perilaku menyimpang di Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar. Data yang dideskripsikan adalah data hasil wawancara mendalam dengan informan penelitian dan data hasil observasi partisipatif peneliti selama melakukan kegiatan penelitian di lapangan. Peran pemerintah yang menjadi titik penekanan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan peran pencegahan dan penindakan. Peran pencegahan yang dimaksudkan dalam penelitian ini terkait dengan program-program pemerintah, baik pemerintah kota maupun pemerintah kelurahan dalam mencegah terjadinya perilaku menyimpang atau praktek prostitusi (Pijat Plus-Plus). Sedangkan peran dalam bentuk penindakan adalah terkait dengan langkah-langkah yang diambil pemerintah, baik pemerintah daerah Kota Makassar maupun pemerintah kelurahan.

Berkaitan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa peran pemerintah, terutama pemerintah kelurahan terkait dengan adanya praktek perilaku menyimpang (prostitusi) di Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukan Kota Makassar adalah dengan melakukan proses pengawasan, dan seandainya mereka atau para pekerja di Panti Pijat memberitahukan terlebih dahulu kepada pemerintah tentang pembukaan atau adanya kegiatan tersebut (Pijat Plus-Plus) maka pemerintah tentu tidak memberikan ijin. Hal ini terungkap dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Lurah setempat:

“ yang kami lakukan hanya sebatas pengawasan saja,..seandainya mereka meminta ijin langsung kepada kami,...mungkin kami tidak memberikan ijin itu. Namun, selama ini ijin Pijat Plus-Plus itu sudah tidak lagi melalui kelurahan dan Kecamatan, akan tetapi mereka bergabung dalam asosiasi,... yang namanya itu,... asosiasi usaha hiburan. Melalui asosiasi ini mereka mengurus perijinan itu ke dinas pariwisata dan perijinan Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu juga tempat Pijat Plus-Plus ini berdiri dengan *beck up* dari oknum-oknum yang kuat, baik dari LSM, ataupun aparat keamanan, dan pemerintahan. Jadi sebagai aparatur pemerintah yang di bawah kami tidak memiliki kekuatan untuk melakukan penindakan atau penutupan...” (wawancara tanggal 10 Januari 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut dapat diketahui bahwa peran pemerintah terutama pemerintah kelurahan terkait dengan keberadaan Panti Pijat D’Top (Pijat Plus-Plus) di Kecamatan Penakkukang Kota Makassar hanya sebatas melakukan pengawasan saja. Pengawasan yang dilakukan pemerintah kelurahan menyangkut jam buka dan jam tutup tempat Pijat tersebut sebagaimana aturan yang mengatur tentang jam buka dan jam tutup tempat hiburan, yaitu dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Pemerintah kelurahan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan peran penindakan terhadap adanya praktek prostitusi (Pijat Plus-Plus) yang ada di Kecamatan Penakkukang Kota Makassar. Hal ini dikarenakan pemerintah kelurahan tidak memiliki kewenangan dalam hal melakukan penindakan. Di satu sisi, ijin keberadaan Panti Pijat Plus-Plus tidak lagi melalui proses administrasi di tingkat kelurahan dan Kecamatan, akan tetapi mereka langsung melakukan pendaftaran ke kantor pariwisata dan perijinan provinsi melalui kelompok yang tergabung dalam asosiasi tempat hiburan malam.

Sebagaimana dengan apa yang di katakan oleh Bapak Mulyadi sebagai pegawai di dinas kepariwisataan (umur 49 tahun), beliau mengungkapkan:

Panti pijat sebenarnya didirikan karena memang di dalamnya terdapat adanya laporan mengenai bisnis dalam pelayanan jasa pijat, karena adanya perizinan mengenai usaha dalam kemasan pijat memijat dan pemerintah dari pusat juga mengizinkan, akhirnya kita sebagai stap di kepariwisataan memberikan perizinan, namun kalau memang tempat tersebut disalah gunakan sebagai tempat prostitusi, insya Allah dalam jangka waktu dekat pasti pihak yang berwenang akan menutup tempat tersebut karena adanya peraktik yang sangat berbahaya (Mulyadi, wawancara 13 Maret 2016)

Hasil wawancara tersebut juga ditemukan bahwa keberadaan Panti Pijat Plus-Plus sesungguhnya banyak mendapatkan dukungan dari oknum-oknum tertentu, baik dari LSM maupun dari pemerintah sendiri. Artinya keberadaan Panti Pijat Plus-Plus telah menjadi area bisnis bagi oknum-oknum tertentu. Mereka mengambil “keuntungan” dibalik adanya kegiatan praktek prostitusi (Pijat Plus-Plus) yang ada di Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar.

Berdasarkan hasil pengamatan langsung penulis di lapangan, keberadaan Panti Pijat sendiri sesungguhnya tidak dilakukan secara terbuka, terutama kegiatan Pijat Plus-Plus, akan tetapi berjalan secara terkondisi di tempat Pijat itu sendiri, artinya Pijat Plus-Plus tersebut merupakan hasil negosiasi antara pengunjung dengan para pekerja (karyawan). Ini semacam praktek menjual jasa yang dilakukan oleh Pemijat kepada para pengunjung yang ingin melakukan Pijat Plus-Plus. Pada konteks ini, awalnya Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar hanya mendapatkan ijin untuk menjalankan kegiatan hiburan, akan tetapi seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan individu dan sosial melahirkan berbagai aktivitas terlarang, termasuk praktek prostitusi (Pijat Plus-Plus). Dalam kondisi yang demikian, pemerintah juga tidak memiliki regulasi yang begitu ketat yang mengatur tentang keberadaan Panti Pijat termasuk adanya aktivitas Pijat Plus-Plus tersebut, karena dalam pemahaman yang lebih luas dan umum, keberadaan Panti Pijat itu sendiri masih menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kelompok masyarakat dengan berbagai argumentasi masing-masing.

Berdasarkan hasil deskripsi data tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah, terutama pemerintah kelurahan dalam mencegah terjadinya perilaku menyimpang adalah sebatas melakukan pengawasan atas waktu beroperasinya tempat hiburan tersebut, yaitu pengawasan mulai jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Adapun peran dalam melakukan penindakan atau penutupan, pemerintah kelurahan tidak memiliki kewenangan, karena sejak awal ijin operasi tempat tersebut (Panti Pijat) proses administrasinya tidak dilakukan oleh pemerintah keluarahan dan kecamatan, akan tetapi dibukanya tempat tersebut atas ijin yang diberikan oleh dinas Pariwisata dan Kantor Perijinan Provinsi Sulawesi Selatan.

1. **Implikasi Sosial Dari Keberadaan Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar**

Pada bagian ini akan dideskripsikan data yang berkaitan dengan implikasi sosial dari keberadaan Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar. Data yang berkaitan dengan implikasi sosial Panti Pijat diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan para informan dan hasil observasi langsung yang dilakukan penulis selama berada di lokasi penelitian.

Berdasarkan data hasil wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian, diperoleh data yang berkaitan dengan implikasi sosial dari keberadaan Panti Pijat D’Top Kecamatan Pankkukang Kota Makassar, dimana dengan adanya Panti Pijat tersebut, masyarakat mengalami pro dan kontra. Ada masyarakat yang menerima dan ada masyarakat yang menolak. Sebagaimana hasil wawancara dengan pak Lurah setempat:

“...ya selama ini perilaku menyimpang di Panti Pijat tersebut kita tidak bisa melihat secara langsung, cuman kalau desas-desus dari masyarakat, mereka itu terjadi menjadi dua golongan, dimana ada masyarakat yang menerima dan ada juga ada masyarakat yang menolak. Ada alasan masyarakat yang menerima, mereka beralasan bahwa dengan adanya tempat Pjat tadi,..itu meningkatkan penghasilan mereka, seperti juru parkir, debeca, debetor atau warung-warung di sekitar tempat Pijat tadi. Sementara untuk masyarakat yang menolak, ya kebanyakan juga dari kalangan orang-orang ustadz ataupun tokoh-tokoh masyarakat. Mereka memandang bahwa lingkungan tempat Pjat Plus-Plus itu tidak baik yang otomatis cepat atau lambat itu akan berpengaruh terhadap generasi di sekitar lingkungan tempat Pijat itu.” (wawancara tanggal 10 Januari 2015).

Mengacu pada hasil wawancara mendalam dengan informan tersebut dapat diketahui bahwa keberadaan Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar sesungguhnya masih menuai pro dan kontra dari masyarakat sekitar. Argumentasi ekonomi selalu menjadi alasan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat yang menerima keberadaaan Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar. Kemudian oleh kelompok masyarakat yang menolak keberadaan Panti Pijat juga memiliki alasan yang kuat yang bisa diterima, dimana keberadaan Panti Pijat dengan segala aktivitas masyarakat, termasuk perilaku menyimpang (prostitusi) yang ada di dalamnya dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap generasi muda yang ada di sekitar lokasi tersebut.

Hal senada juga disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa keberadaan Panti Pijat sesungguhnya sampai sekarang ini masih dipersoalkan oleh berbagai kelompok masyarakat, sebagaimana penuturan informan berikut:

“...iya mas, keberadaan Panti Pijat ini masih ada pro dan kontra dari kelompok masyarakat tertentu... ya mau bilang apa,..mereka semua punya alasan masing-masing” (wawancara tanggal 15 Januari 2016).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar masih menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Kondisi demikian mempertegas bahwa Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar masih mengalami kontroversi. Hasil observasi langsung penulis di lapangan ditemukan bahwa keberadaan Panti Pijat D’Top Kecamatan Pankkukang Kota Makassar membawa implikasi sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Implikasi ekonomi terlihat dari adanya aktivitas ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat di sekitar wilayah Panti Pijat. Dengan adanya pengunjung yang datang mengunjungi Panti Pijat, masyarakat sekitar juga merasakan adanya nilai tambah secara ekonomi. Mereka bisa berjualan, menagih jasa parkir kendaraan bermotor, dan lain-lain. Sedangkan implikasi sosial keberadaan Panti Pijat menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat tertentu akan pengaruh negatifnya bagi keberlanjutan generasi muda. Di satu sisi, keberadaan Panti Pijat juga menimbulkan ketidakharmonisan masyarakat, karena lahirnya berbagai perbedaan pandangan di dalam masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan data hasil wawancara mendalam dengan para informan dan observasi langsung yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa implikasi sosial keberadaan Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukan Kota Makassar telah melahirkan perbedaan pandangan yang tajam dari berbagai kelompok masyarakat, terutama masyarakat yang ada di sekitar lokasi Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar tersebut, dimana masyarakat terbagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok yang menerima dan menolak keberadaan Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar. Masing-masing kelompok memiliki pandangan atau alasan yang sama-sama bisa diterima. Alasan bagi kelompok yang menerima bersifat ekonomis, dimana dampak dari keberadaan Panti Pijat D’Top dapat dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi kecil sebagai tempat mencari nafkah, sementara alasan dari kelompok yang menolak, dimana dengan keberadaan Panti Pijat D’Top dengan berbagai kegiatan terlarang seperti hal prostitusi membawa dampak pada kerusakan moral generasi muda.

**B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dideskripsikan, maka masing-masing hasil penelitian dapat dilakukan pembahasan sesuai dengan fokus penelitian yang ada.

1. **Faktor Yang Melatarbelakangi Perubahan Fungsi Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dipaparkan di bab IV di atas, bahwa faktor yang melatarbelakangi perubahan fungsi Panti Pijat D’Top Kecamatan Panakukkang Kota Makassar yakni faktor dari dalam berupa kondisi ekonomi, rendahnya pendidikan dan perceraian. Adapun factor dari luar yakni eksploitasi terhadap panti pijat dan penyalahgunaan obat terlarang.

Berikut akan dijelaskan faktor dari dalam yakni sebagai berikut:

1. Kondisi ekonomi

Kondisi sosial ekonomi lebih dominan mempengaruhi sikap dan perilaku individu yang bekerja sebagai penjual jasa Pijat tersebut. Kegiatan Pijat Plus-Plus merupakan langkah “terpaksa” sebagai alternatif dalam menghadapi berbagai tekanan yang ada. Banyaknya masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing pekerja (karyawan) Panti Pijat, karena kondisi ekonomi yang telah memaksa mereka untuk melakukan berbagai tindakan dalam menentukan pilihan hidup, termasuk menjalankan aktivitas prostitusi atau dalam istilah lain adalah Pijat Plus-Plus. Kondisi demikian telah menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari

1. Rendahnya Pendidikan

Suatu bangsa dikatakan baik, buruk, sejahtera, maju dan berkembang di ukur dari bagaimana kesejahteraan ekonomi masyarakat dan tingginya suatu pendidikan yang di alami oleh suatu bangsa. Untuk itu pendidikan memang menjadi salah satu syarat untuk menunjang dan mengarahkan masyarakat ke arah kemajuan dan perkembangan bagi suatu bangsa. Tingginya pendidikan suatu masyarakat akan menciptakan suatu kreasi atas pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh generasi anak bangsa dan negara. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kihajar dewantara (2008:73) bahwa tingginya tingkat pendidikan yang di enyam, didapatkan oleh suatu bangsa maka akan semakin tinggi pembangunan yang ada di indonesia.

Pendidikan yang ada di indonesia saat ini, masih bisa dikatakan belum cukup maju dan masih dalam proses perkembangan, dikarenakan pendidikan yang ada belum bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik kepada masyarakat nya, hal tersebut di tandai oleh banyaknya perilaku menyimpang seperti pelacuran yang ada di belahan penjuru dunia. Di mana dapat tergolongkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan yang didapatkan oleh seseorang menjadi pemicu atas lahirnya perilaku menyimpang yang di lakukan oleh mayarakat, dikarenakan lapangan pekerjaan semakin sulit sementara persaingan semakin banyak. Dan ketika terjadinya pelacuran pada suatu daerah tentunya hal tersebut adalah menjadi tanggung jawab kita bersama baik pemerintah maupun pemerintah setempat. Seperti halnya pelacuran yang ada di panti pijat D’Top. Terjadinya pelacuran di panti Pijat D’Top di karenakan oleh kehidupan yang sangat keras di kota yang di mana seseorang susah melakukan adaptasi karena terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki dan tidak disertai dengan adanya skill atau kemampuan khusus sehingga berbagai tindakan sosial akan dilakukan demi untuk melangsungkan hidupnya di masyarakat kota, bila mana tanggung jawab yang besar ada di pundak seseorang maka semakin besar tuntutan hidup yang dipikul. Untuk itu, pelacuran yang terjadi di panti pijat D’Top berdasarkan atas suatu kebutuhan hidup, namun disadari juga bahwa permasalahan pelacuran yang ada di berbagai kalangan masyarakat disebabkan oleh berbagai latar belakang dari individu sendiri. Untuk di perlukan suatu usaha perbaikan atau penanggulangan atas segala bentuk pelacuran yang terjadi di masyarakat, seperti yang ada di Panti Pijat D’Top Kecamatan Panakukkang Kota Makassar.

Di tinjau dari sudut pandang teori integrasi sosial (Emile Durkheim 1983:113) bahwa tindakan pelacuran yang terjadi pada suatu masyarakat itu disebabkan oleh adanya diffrensiasi dalam suatu masyarakat dan oleh adanya struktur yang mengikat suatu masyarakat tanpa diikuti oleh spesialisasi norma khusus atau aturan khusus di dalam suatu lembaga atau organisasi sehingga seseorang tidak lagi melakukan perilaku menyimpang. Di mana diffrensiasi yang di maksud artinya terdapatnya suatu pembagian kerja atas terbentuknya masyarakat modern, berdasarkan oleh adanya kepentingan individu, spesialisasi kerja atau adanya keterampilan khusus yang di ukur dari tingkat pendidikan yang ditempuh. Hubungan sosial yang terbentuk oleh adanya differensiasi sosial mengakibatkan terjadinya perbedaan-perbedaan kepentingan, namun saling tergantung satu dengan yang lain karena masing-masing orang saling membutuhkan. Hal tersebut dapat di pahami melalui konsep solidaritas organik Durkheim (1983:114). Semakin tinggi diffrensiasi sosial yang terjadi maka akan semakin tinggi pula perilaku menyimpang yang akan terjadi pada masyarakat. Dalam hal ini, tindakan sosial yang berkembang di tentukan oleh cepatnya differensiasi sosial. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Antony Giddens lewat bukunya Ritzer (2014) lewat teorinya strukturasi yang menyatakan bahwa tindakan sosial individu dibentuk oleh dualisme dan di ikuti oleh agensi atau aktor yang melakukan. Sementara struktur bagi diffrensiasi Durkheim menandakan adanya sistem tempat individu melakukan berbagai macam aktifitas atau tindakan sosial dalam hal ini kaitannya terhadap perilaku menyimpang, seperti yang ada di panti pijat D’Top Kecamatan Panakukkang Kota Makassar.

Dari adanya teori integrasi sosial Emile Durkheim di atas, memberikan gambaran bahwa terjadinya perilaku prostitusi di panti pijat D’Top tersebut akibat tingginya suatu perkembangan masyarakat modern atau kota berdasarkan spesialisasi kerja khusus. Untuk itu sangat relevans dengan cara yang bisa di pakai dalam mengatasi terjadinya pelacuran adalah membangun kembali integrasi sosial yang bersifat solidaritas mekanik sesuai dengan sifatnya yang berdasarkan kesetia kawanan, kesamaan tujuan untuk membentuk masyarakat yang aman, adil, makmur dan sejahtera, di mana dalam hal tersebut akator-aktor yang terlibat seperti pemilik panti pijat, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam menangani penyakit kelamin atau pelacuran yang ada di masyarakat, khususnya yang ada di panti pijat D’Top Kecamatan Panakukkang Kota Makassar

Sebagaimana faktor yang melatar belakangi terjadinya tindakan pelacuran karena rendahnya tingkat pendidikan karyawan di panti pijat, maka perlu di adakan tindakan perbaikan seperti pemberdayaan kembali terhadap kalangan pelaku yang mengerjakan pelacuran melalui pemberian arahan tentang bahayanya perilaku pelacuran baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain, disertai dengan memberikan keterampilan-keterampilan lain kepada setiap pelaku pelacuran di panti pijat D’Top untuk bisa memiliki keterampilan lain, seperti mengajarkan berwirausaha, berdagang atau mengerjakan hal lain selain menjadi seorang pekerja seks atau pelacuran. Atau dengan cara memberikan inovasi pendidikan seperti menurut Weber (Narwoko Bagong, 2011:27) mengatakan bahwa Inovasi pendidikan akan bisa menunjang ekonomi yang lebih baik dan mapan melalui jalan pemberian ide, kreatifitas kerja pada situasi tertentu.

Di tinjau dari teorinya Max Weber (Weber, 1921/1968: 24) yang mengatakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu seseorang bisa mengedepankan tindakan rasional instrumental yang di mana tindakan seseorang yang dilakukan berdasarkan atas bahan pertimbangan-pertimbangan yang rasional sehingga seseorang tidak akan gampangmelakukan tindakan pelacuran dip anti pijat D’Top di kecamatan Panakukkang kota Makassar.

1. Perceraian

Dalam suatu pernikahan, perceraian memang sangat di benci oleh agama dikarenakan pernikahan adalah suatu hal yang mulia. Berlangsungnya suatu perceraian dalam suatu keluarga biasanya di akibatkan oleh adanya pernikahan usia dini, dan oleh adanya ekonomi yang tidak mapan, ketidak nyamanan yang dirasakan oleh pasangan suami isteri, sehingga terjadi suatu perceraian.

Di bangsa indonesia ini, rata-rata tingkat perceraian diakibatkan oleh adanya pernikahan usia dini, di mana pernikahan pada usia tersebut belum adanya kesiapan mental berupa kamatangan dalam berpikir atau belum dewasa sehingga tidak mudah untuk mempertahankan hubungan pernikahan yang sudah dijalani.

Sebagaimana yang ada di panti pijat D’Top, bahwa yang menyebabkan terjadinya pelacuran adalah karena adanya perceraian, yang dimulai dengan kurangnya kasih sayang yang didapatkan, dan adanya pemanfaatan suami terhadap isteri di mana suaminya yang tidak bekerja, akhirnya dengan begitu karyawan terjerumus kedalam tindakan pelacuran.

Untuk itu, dalam mengurangi suatu tingkat perceraian dalam keluarga dibutuhkan kerjasama yang baik antara anggota keluarga dengan cara melaksanakan setiap peran-peran atau tanggung jawab yang ada pada setiap individu untuk mencapai suatu keseimbangan. Seperti yang dikatakan oleh Talcout Parson dalam teorinya structural fungsional (2014) bahwa dalam setiap struktur apabila fungsi-fungsi yang ada berjalan dengan baik maka akan tercipta suatu keseimbangan, karena terdapat sifat keluarga yang simbiosis mutualisme.

Di tinjau dari teori integrasi sosial Durkheim (1983), yang mengatakan bahwa terdapatnya aturan-aturan dalam pembagian kerja dalam keluarga, akan terbentuk suatu asosiatif atau kerjasama yang baik melalui solidaritas organik. Dalam menciptakan suatu keseimbangan pada suatu keluarga dapat di bentuk melalui adanya suatu solidaritas organik, di mana masing-masing keluarga bekerja secara gotong royong dalam memenuhi setiap kebutuhan ekonomi keluarga dan sama-sama memahami peran-peran yang ada pada diri masing-masing.

Adanya penjelasan terhadap integrasi sosial dalam keluarga menurut Durkheim di atas, menggambarkan bahwa keutuhan suatu keluarga terletak pada bagaimana individu-individu atau anggota yang menjalani kehidupannya di keluarga saling mengerjakan kerjasama dalam setiap memenuhi kebutuhan fisik maupun psikisnya, sehingga akan tercapai suatu keluarga yang harmonis.

Adapun seperti yang terjadi pada kasus perceraian karyawan dipanti pijat, disebabkan oleh adanya suatu tindakan sosial yang mengambil keputusan secara terburu-buru tanpa memikirkan bagaimana akibat atau dampak yang akan ditimbulkan oleh adanya tindakan pelacuran yang dilakukan. Hal tersebut terjadi sepeti apa yang dikatakan oleh Weber (1968;25) bahwa adanya suatu tindakan afektif yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan emosi. Dalam hal ini yang di maksud adalah perasaan, amarah atau hawa napsu yang tidak baik sehingga melakukan perceraian dan melakukan tindakan pelacuran.

Untuk itu dalam hal mencegah terjadinya tindakan pelacuran seperti yang ada di panti pijat D’Top, maka diperlukannya suatu keseimbangan dalam keluarga dengan sama-sama memahami peran dan fungsinya dalam keluarga, supaya tercapai keharmonisan atau kebahagiaan dalam keluarga, dan jangan keputusan berdasarkan atas emosi atau kemaran supaya perceraian dapat dihindarkan.

Adapun faktor dari luar yang menyebabkan terjadinya perilaku pelacuran yakni:

1. Eksploitasi terhadap karyawan

Dalam eksploitasi terhadap karyawan pemberian gaji yang sedikit adalah bentuk eksploitasi ekonomi yang dialami oleh karyawan di Panti Pijat,selain itu mereka harus bekerja berjam-jam dari pagi sampai malam. Tenaga yang terkuras tidak sebanding dengan apa yang didapat oleh karyawan panti pijat,terlebih jika pembayaran gaji tidak diberikan langsung dan harus menunggu hingga kurang lebih satu bulan.

Bentuk lain dari adanya eksploitasi ekonomi adalah tidak terpenuhinya hak-hak pekerja oleh pihak perusahaan. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Ketenagakejaan Nomor 13 tahun 2003, hak tersebut antara lain: hak untuk memperoleh imbalan atau upah, hak memperoleh fasilitas berupa berbagi tunjangan dan bantuan, hak mengembangkan potensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan, hak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesusilaan, kesehatan, pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan yang sesuai harkat, martabat manusia dan moral agama; hak mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja; hak mendapatkan cuti; dan hak memperoleh perlindungan hukum.

Tindakan eksploitasi biasanya dilakukan saat adanya suatu hubungan kerja sama antara patron-klien, bos terhadap karyawan, dan lain-lain. Yang biasanya menimbulkan suatu tindakan perlawanan karena merasa tidak mendapatkan suatu keadilan. Eksploitasi di artikan sebagai suatu tindakan seseorang yang secara berlebihan memanfaatkan sesuatu dalam hal ini adalah kerja. Seperti kasus yang melatarbelakangi terjadinya perilaku pelacuran dipanti pijat menjadikan karyawan berpikir untuk melakukan pelacuran pada tempat kerjanya.

Sebagaimana dalam idiologi Marxisme (2012:6) menjelaskan bahwa tindakan sosial yang dilakukan dalam masyarakat merupakan bagian dari tindakan pembebasan. Hal tersebut dapat di lihat dari bagaimana kaum borjuis di lawan oleh kaum proletar dalam mendapatkan suatu keadilan. Hal tersebut dapat dipahami pada revolusi industry sebagai basis perjuangan Karl Mark dalam melawan kapitalisme.

Dari sisi teori integrasi sosial, melihat bahwa adanya industri-industri yang bermunculan di kota sebagai tanda bahwa adanya kehidupan modern menjanjikan suatu kemewahan sehingga membuat orang banyak yang berpindah dari desa ke-kota untuk bekerja, dengan banyaknya orang yang berpindah dari desa ke-kota dengan berbagai macam latar belakang suku, ras, agama, atau kelompok menjadikan kota mengalami kepadatan penduduk dan dengan prosesnya menjadikan masyarakat kota menjadi masyarakat yang majemuk dengan sifat dan karakter yang berbeda-beda.

adanya perkembangan masyarakat kota di tandai oleh adanya industry-industri di kota seperti panti pijat D’Top yang ada di kecamatan panakukkang sehingga memberikan asumsi kepada masyarakat secara universal bahwa di kota seseorang bisa mendapatkan pekerjaan bagus dan bisa mengubah kondisi prekonomian keluarga. Akan tetapi kehidupan di kota justru adalah kehidupan yang sangat sulit dan keras, faktanya bahwa kehidupan di kota sangat sulit untuk memperoleh suatu pekerjaan dikarenakan banyaknya persaingan—persaingan antar industri dan antar tenaga kerja.

Dari gambaran di atas, dapat di pahami bahwa persoalan-persoalan yang muncul akibat adanya perkembangan masyarakat modern atas masyarakat kota menjadikan seseorang harus bisa memiliki suatu pegangan berupa kemampuan-kemampuan atau skill yang khusus bisa di pakai dalam melakukan adaptasi di lingkungan masyarakat kota serta mampu menjamin keberadaannya sebagai individu yang bekerja.

Untuk itu diperlukan suatu tindakan sosial yang tepat dan baik, berupa kerja keras, atau etos kerja yang tinggi, tekun, dan memiliki wawasan yang tinggi akan dunia kerja dengan karakter moral yang harus diperhatikan, agar dalam upaya mencapai suatu kesuksesan dapat sesuai dengan apa yang diharapkan, dan tidak bertentangan dengan nilai dan norma yang ada pada suatu masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan teorinya Weber mengenai tindakan rasionalitas berorientasi pada nilai. Di mana tindakan tersebut, ditentukan oleh keyakinan penuh kesadaran akan nilai perilaku-perilaku etis, estetis, religius atau bentuk perilaku lain dalam mencapai keberhasilan (Weber, 1921/1968;24-25).

1. Penyalahgunaan obat terlarang

Penyalahgunaan obat-obat terlarang menjadi salah satu cara dalam mendapatkan suatu mentalitas kerja yang optimal. hal ini terbukti dengan maraknya perusahaan atau industri yang menggunakan obat-obatan terlarang yang dipakai sebagai dosis untuk memberikan spirit atau semangat kepada seorang individu dalam mempromosikan maupun menjual jasa beserta produk yang bisa dibeli oleh masyarakat, seperti jasa seks yang ada di panti pijat D’Top.

Pemakaian obat terlarang di anggap dapat membantu segala proses yang dilakukan dalam suatu industri panti pijat, sehingga dapat mengundang reaksi bagi khalayak rame atau pengunjung yang datang ke panti pijat. Ketatnya persaingan dalam bisnis membuat para industri dan karyawan mencoba untuk menciptakan strategi yang efektif untuk dapat menambah penghasilan salah satunya dengan memakai obat-obatan terlarang supaya memiliki hasrat dalam melakukan hubungan seks. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa dalam perkembangan dunia industri, industri sering memakai jalan-jalan yang di anggap ilegal dan nantinya akan membahayakan kesehatan masyarakat, akan tetapi dengan melihat bagaimana reaksi dari seseorang dan melihat bahwa dengan jalan itu membuat karyawan cepat memperoleh uang yang banyak sehingga tidak menjadi halangan bagi dirinya untuk memakai obat-obatan terlarang.

Yang mempermudah karyawan untuk menarik perhatian dan keinginan terhadap pengunjung dalam melakukan hubungan seks di karenakan, panti pijat memiliki daya tarik dan nilai lebih dalam hal membujuk konsumen dengan tanpa rasa malu ketika memakai obat-obatan yang terlarang. Di mana wanita sebagai instrument bujuk rayuan menurut baudrillard, beroperasi melalui pengosongan tanda-tanda dari pesan dan maknanya, sehingga yang tersisa adalah ketertarikan semata.

Sedangkan menurut Jean Kilbourne Perempuan sebagai objek sensual yang memiliki kekuatan menarik perhatian sebagaimana komentar dalam artikelnya *“Beauty and the Beast of Advertising”* adalah sebuah *Mannequin* atau tubuh yang harus di pandang sempurna, tidak boleh ada keriput, lemak berlebih, tidak berkomedo, langsing, berkaki indah, muda dan segar. Artinya, perempuan sebagai objek seks haruslah sempurna secara fisik, sebagai pemuas hasrat laki-laki ataupun dalam kalangannya sendiri (Kilbourne,1995)

Strategi tersebut menjelma menjadi  *libidonomics,* yakni sebuah sistem pendistribusian rangsangan, rayuan, kesenangan dan kegairahan dalam masyarakat. Piliang (2004 : 296) juga berpendapat bahwa di dalam tubuh ekonomi (kapitalisme global) berkembang sebuah logika yang disebutnya logika hasrat *(the logics of desire).* Maksud yang terkandung dalam ungkapan ini adalah bahwa lalu lintas ekonomi disertai oleh lalu lintas hasrat.

Saat ini kita sulit menafikan bahwa obat-obatan terlarang sudah menjamur dalam setiap praktik-praktik pelacuran, baik di hotel, kafe, rumah panggilan, panti pijat dan lain sebagainya. Bahkan obat-obatan terlarang sudah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kalangan pekerja seks.

Dalam analisis integrasi sosial, setidaknya ada beberapa hal yang bisa di amati dari adanya pemakaian obat-obatan terlarang dipanti pijat yaitu pertama ekonomi politik obat, konsep ini berkaitan dengan sejauh mana karyawan-karyawan yang bekerja dipanti pijat bisa menarik perhatian dan kemauan pengunjung supaya proses nego dalam berhubungan seks nantinya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Karena banyaknya persaingan antar panti pijat membuat pemilik panti pijat menciptakan strategi seperti tersebut dengan memberikan obat-obatan tersebut kepada karyawan untuk dikonsumsi.

Kedua, politik tanda napsu, konsep ini berkaitan dengan bagaimana menjajakan atau menjual napsunya kepada para pengunjung oleh karyawan yang berada dipanti pijat melalui jasa pemijatan yang dilakukan berganti menjadi penjualan seks atau bersetubuh. menjelaskan bagaimana tubuh dan citra tubuh perempuan merupakan strategi di dalam politik eksplorasi hasrat perempuan, di dalam relasi psikis yang dibentuk kapitalisme.

napsu sebagai objek psikis dapat diproduksi sebagai komoditi untuk dipertukarkan. Sistem komoditi dalam kapitalisme mempunyai hubungan timbal balik dengan sistem produksi napsu, yaitu ketika komoditi diproduksi maka dibaliknya sekaligus diproduksi napsu. Pada level ekonomi lainnya ketika komoditi dipertukarkan maka secara bersamaan terbentuk pertukaran napsu.

Dengan begitu dapat dinyatakan bahwa adanya tindakan sosial seperti pemakaian obat-obatan terlarang di panti pijat merupakan bagian dari tindakan rasional instrumenta Weber (1983) yang dikembangkan oleh pemilik panti pijat dengan karyawan terhadap para pengunjung.

Di lihat dari ke-empat faktor yang di atas sebagai factor pendorong terjadinya perilaku menyimpang, kemudian dapat diberikan penjelasan bahwa adanya pembagian kerja yang ditandai pada differensiasi sosial disertai oleh adanya struktur yang mengikat individu untuk berperilaku menyebakan mudahnya proses pelacuran yang terjadi di panti pijat D’Top.

Adapun Kartini Kartono (2013: 245-248) mengemukakan secara panjang lebar 22 motif yang melatarbelakangi pelacuran (prostitusi) yaitu: (1) Adanya kecenderungan melacurkan diri pada banyak wanita untuk menghindarkan diri dari kesulitan hidup, dan mendapatkan kesenangan melalui jalan pendek. Kurang pengertian, kurang pendidikan, dan buta huruf, sehingga menghalalkan pelacuran; (2) Ada nafsu-nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian, dan keroyalan seks. Hysteris dan hyperseks, sehingga tidak merasa puas mengadakan relasi seks dengan satu pria/suami; (3) Tekanan ekonomi, faktor kemiskinan, dan pertimbangan-pertimbangan ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, khususnya dalam usaha mendapatkan status sosial yang lebih baik; (4) Aspirasi materiil yang tinggi pada diri wanita dan kesenangan ketamakan terhadap pakaian-pakaian indah dan perhiasan mewah. Ingin hidup bermewah-mewah, namun malas bekerja; (5) Kompensasi terhadap perasaan-perasaan inferior. Jadi ada *adjustment* yang negative, terutama sekali tarjadi pada masa puber dan adolesens. Ada keinginan untuk melebihi kakak, ibu sendiri, teman putri, tante-tante atau wanita-wanita *mondain* lainnya; (6) Rasa ingin tahu gadis-gadis cilik dan anak-anak puber pada masalah seks, yang kemudian tercebur dalam dunia pelacuran oleh bujukan bandit-bandit seks; (7) Anak-anak gadis memberontak terhadap otoritas orang tua yang menekankan banyak tabu dan peraturan seks. Juga memberontak terhadap masyarakat dan norma-norma susila yang dianggap terlalu mengekang diri anak-anak remaja , mereka lebih menyukai pola seks bebas; (8) Pada masa kanak-kanak pernah malakukan relasi seks atau suka melakukan hubungan seks sebelum perkawinan (ada *premarital sexrelation*) untuk sekedar iseng atau untuk menikmati “masa indah” di kala muda; (9) Gadis-gadis dari daerah slum (perkampungan-perkampungan melarat dan kotor dengan lingkungan yang immoral yang sejak kecilnya selalu melihat persenggamaan orang-orang dewasa secara kasar dan terbuka, sehingga terkondisikan mentalnya dengan tindak-tindak asusila). Lalu menggunakan mekanisme promiskuitas/pelacuran untuk mempertahankan hidupnya; (10) Bujuk rayu kaum laki-laki dan para calo, terutama yang menjajikan pekerjaan-pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi; (11) Banyaknya stimulasi seksual dalam bentuk : film-film biru, gambar-gambar porno, bacaan cabul, geng-geng anak muda yang mempraktikkan seks dan lain-lain; (12) Gadis-gadis pelayan toko dan pembantu rumah tangga tunduk dan patuh melayani kebutuhan-kebutuhan seks dari majikannya untuk tetap mempertahankan pekerjaannya; (13) Penundaan perkawinan, jauh sesudah kematangan biologis, disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomis dan standar hidup yang tinggi. Lebih suka melacurkan diri daripada kawin; (14) Disorganisasi dan disintegrasi dari kehidupan keluarga, *broken home*, ayah dan ibu lari, kawin lagi atau hidup bersama dengan partner lain. Sehingga anak gadis merasa sangat sengsara batinnya, tidak bahagia, memberontak, lalu menghibur diri terjun dalam dunia pelacuran; (15) Mobilitas dari jabatan atau pekerjaan kaum laki-laki dan tidak sempat membawa keluarganya; (16) Adanya ambisi-ambisi besar pada diri wanita untuk mendapatkan status sosial yang tinggi, dengan jalan yang mudah tanpa kerja berat, tanpa suatu skill atau ketrampilan khusus; (17) Adanya anggapan bahwa wanita memang dibutuhkan dalam bermacam-macam permainan cinta, baik sebagai iseng belaka maupun sebagai tujuan-tujuan dagang; (18) Pekerjaan sebagai lacur tidak membutuhkan keterampilan/skill, tidak memerlukan inteligensi tinggi, mudah dikerjakan asal orang yang bersangkutan memiliki kacantikan, kemudaan dan keberanian; (19) Anak-anak gadis dan wanita-wanita muda yang kecanduan obat bius (hash-hish, ganja, morfin, heroin, candu, likeur/minuman dengan kadar alkohol tinggi, dan lain-lain) banyak menjadi pelacur untuk mendapatkan uang pembeli obat-obatan tersebut; (20) Oleh pengalaman-pengalaman traumatis (luka jiwa) dan shock mental misalnya gagal dalam bercinta atau perkawinan dimadu, ditipu, sehingga muncul kematangan seks yang terlalu dini dan abnormalitas seks; (21) Ajakan teman-teman sekampung/sekota yang sudah terjun terlebih dahulu dalam dunia pelacuran; dan (22) Ada kebutuhan seks yang normal, akan tetapi tidak dipuaskan oleh pihak suami.

Dari berbagai pandangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi seorang individu memasuki dunia prostitusi dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa rendahnya standar moral dan nafsu seksual yang dimiliki orang tersebut. Sedangkan faktor eksternal berupa kesulitan ekonomi, korban penipuan, korban kekerasan seksual dan keinginan untuk memperoleh status sosial yang lebih tinggi.

a.Kondisi ekonomi

Kondisi sosial ekonomi lebih dominan mempengaruhi sikap dan perilaku individu yang bekerja sebagai penjual jasa Pijat tersebut. Kegiatan Pijat Plus-Plus merupakan langkah “terpaksa” sebagai alternatif dalam menghadapi berbagai tekanan yang ada. Banyaknya masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing pekerja (karyawan) Panti Pijat, karena kondisi ekonomi yang telah memaksa mereka untuk melakukan berbagai tindakan dalam menentukan pilihan hidup, termasuk menjalankan aktivitas prostitusi atau dalam istilah lain adalah Pijat Plus-Plus. Kondisi demikian telah menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari.

Temuan tersebut sejalan dengan pandangan Kauma (2002: 29-30) yang mengemukakan beberapa sebab yang menjadikan individu melakukan penyimpangan, termasuk penyimpangan seksual (prostitusi), yaitu: (1) Kurangnya kemampuan remaja untuk mengontrol dan mengendalikan diri, terutama emosi-emosinya. Hal ini membuat remaja melakukan hal-hal yang negatif diantaranya hubungan seks bebas tanpa disertai berpikir panjang apa dampak yang ditimbulkan untuk masa depannya; (2) Adanya ketidakstabilan psikis. Karena jiwanya yang masih belum mampu mengendalikan emosinya, maka hal ini mudah saja menjerumuskan individu dalam melakukan perbuatan negatif; (3) Adanya konflik-konflik intern yang sangat kuat. Hal ini dilakukan oleh para individu sebagai pelampiasan dirinya dari segala problem yang sedang menghimpit jiwanya; dan (4) Adanya kebimbangan pada dirinya yang merasa belum pernah menemukan norma yang mantap yang bisa dijadikan pegangan hidup, sehingga ia melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma susila dan agama.

Sementara itu Kartini Kartono (2013: 245-248) mengemukakan secara panjang lebar 22 motif yang melatarbelakangi pelacuran (prostitusi) yaitu: (1) Adanya kecenderungan melacurkan diri pada banyak wanita untuk menghindarkan diri dari kesulitan hidup, dan mendapatkan kesenangan melalui jalan pendek. Kurang pengertian, kurang pendidikan, dan buta huruf, sehingga menghalalkan pelacuran; (2) Ada nafsu-nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian, dan keroyalan seks. Hysteris dan hyperseks, sehingga tidak merasa puas mengadakan relasi seks dengan satu pria/suami; (3) Tekanan ekonomi, faktor kemiskinan, dan pertimbangan-pertimbangan ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, khususnya dalam usaha mendapatkan status sosial yang lebih baik; (4) Aspirasi materiil yang tinggi pada diri wanita dan kesenangan ketamakan terhadap pakaian-pakaian indah dan perhiasan mewah. Ingin hidup bermewah-mewah, namun malas bekerja; (5) Kompensasi terhadap perasaan-perasaan inferior. Jadi ada *adjustment* yang negative, terutama sekali tarjadi pada masa puber dan adolesens. Ada keinginan untuk melebihi kakak, ibu sendiri, teman putri, tante-tante atau wanita-wanita *mondain* lainnya; (6) Rasa ingin tahu gadis-gadis cilik dan anak-anak puber pada masalah seks, yang kemudian tercebur dalam dunia pelacuran oleh bujukan bandit-bandit seks; (7) Anak-anak gadis memberontak terhadap otoritas orang tua yang menekankan banyak tabu dan peraturan seks. Juga memberontak terhadap masyarakat dan norma-norma susila yang dianggap terlalu mengekang diri anak-anak remaja , mereka lebih menyukai pola seks bebas; (8) Pada masa kanak-kanak pernah malakukan relasi seks atau suka melakukan hubungan seks sebelum perkawinan (ada *premarital sexrelation*) untuk sekedar iseng atau untuk menikmati “masa indah” di kala muda; (9) Gadis-gadis dari daerah slum (perkampungan-perkampungan melarat dan kotor dengan lingkungan yang immoral yang sejak kecilnya selalu melihat persenggamaan orang-orang dewasa secara kasar dan terbuka, sehingga terkondisikan mentalnya dengan tindak-tindak asusila). Lalu menggunakan mekanisme promiskuitas/pelacuran untuk mempertahankan hidupnya; (10) Bujuk rayu kaum laki-laki dan para calo, terutama yang menjajikan pekerjaan-pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi; (11) Banyaknya stimulasi seksual dalam bentuk : film-film biru, gambar-gambar porno, bacaan cabul, geng-geng anak muda yang mempraktikkan seks dan lain-lain; (12) Gadis-gadis pelayan toko dan pembantu rumah tangga tunduk dan patuh melayani kebutuhan-kebutuhan seks dari majikannya untuk tetap mempertahankan pekerjaannya; (13) Penundaan perkawinan, jauh sesudah kematangan biologis, disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomis dan standar hidup yang tinggi. Lebih suka melacurkan diri daripada kawin; (14) Disorganisasi dan disintegrasi dari kehidupan keluarga, *broken home*, ayah dan ibu lari, kawin lagi atau hidup bersama dengan partner lain. Sehingga anak gadis merasa sangat sengsara batinnya, tidak bahagia, memberontak, lalu menghibur diri terjun dalam dunia pelacuran; (15) Mobilitas dari jabatan atau pekerjaan kaum laki-laki dan tidak sempat membawa keluarganya; (16) Adanya ambisi-ambisi besar pada diri wanita untuk mendapatkan status sosial yang tinggi, dengan jalan yang mudah tanpa kerja berat, tanpa suatu skill atau ketrampilan khusus; (17) Adanya anggapan bahwa wanita memang dibutuhkan dalam bermacam-macam permainan cinta, baik sebagai iseng belaka maupun sebagai tujuan-tujuan dagang; (18) Pekerjaan sebagai lacur tidak membutuhkan keterampilan/skill, tidak memerlukan inteligensi tinggi, mudah dikerjakan asal orang yang bersangkutan memiliki kacantikan, kemudaan dan keberanian; (19) Anak-anak gadis dan wanita-wanita muda yang kecanduan obat bius (hash-hish, ganja, morfin, heroin, candu, likeur/minuman dengan kadar alkohol tinggi, dan lain-lain) banyak menjadi pelacur untuk mendapatkan uang pembeli obat-obatan tersebut; (20) Oleh pengalaman-pengalaman traumatis (luka jiwa) dan shock mental misalnya gagal dalam bercinta atau perkawinan dimadu, ditipu, sehingga muncul kematangan seks yang terlalu dini dan abnormalitas seks; (21) Ajakan teman-teman sekampung/sekota yang sudah terjun terlebih dahulu dalam dunia pelacuran; dan (22) Ada kebutuhan seks yang normal, akan tetapi tidak dipuaskan oleh pihak suami.

Dari berbagai pandangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi seorang individu memasuki dunia prostitusi dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa rendahnya standar moral dan nafsu seksual yang dimiliki orang tersebut. Sedangkan faktor eksternal berupa kesulitan ekonomi, korban penipuan, korban kekerasan seksual dan keinginan untuk memperoleh status sosial yang lebih tinggi.

Hasil penelitian ini telah memperkuat berbagai pandangan yang berkaitan dengan faktor yang melatarbelakangi perubahan fungsi Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar. Hasil penelitian ini juga telah mengungkap bahwa perubahan sikap individu dalam sebuah kelompok sosial dipengaruhi oleh adanya tekanan yang terjadi dalam diri setiap individu, baik tekanan sosial, budaya, maupun ekonomi.

Emile Durkheim dalam kajiannya tentang fakta sosial mengungkapkan bahwa untuk melihat individu secara utuh, setiap orang hendaknya mempehatikan fakta sosial yang melingkupinya. Manusia hidup di dalam masyarakat, bukan sekedar bersama masyarakat. Masyarakat yang akan membentuk individu, bukan sebaliknya. Pernyataan Durkheim ini menekankan begitu pentingnya fakta sosial bagi keberadaan dan pembentukan manusia secara individu (Arisandi, 2015: 54).

Lebih lanjut Durkheim mengatakan bahwa fakta sosial dibedakan menjadi dua, yakni material dan nonmaterial. Fakta sosial material lebih mudah dipahami karena bisa diobservasi secara langsung melalui indra, seperti gaya arsitektur, institusi keagamaan, bentuk teknologi dan hukum serta perundang-undangan tertulis. Sedangkan fakta sosial nonmaterial bersifat dorongan dari luar yang tidak tampak, seperti moral, norma, ajaran agama dan keyakinan, serta budaya (Arisandi, 2015: 56). Lebih lanjut dikemukakan, dalam kajiannya tentang fakta sosial, Durkheim mengungkapkan bahwa salah satu bentuk fakta sosial nonmaterial adalah arus sosial. Arus sosial merupakan sebuah gejala dari fakta sosial lain yang mengakibatkan suatu perubahan pada masyarakat.

1. **Peran Pemerintah dalam Mencegah Terjadinya Penyimpangan Di Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar**

Pemerintah daerah Kota Makassar sebagai salah satu institusi sosial memiliki peran yang sangat besar dalam mencegah terjadinya berbagai penyimpangan sosial di tengah kehidupan masyarakat. Pada konteks ini, pemerintah Kota Makassar memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur proses-proses sosial masyarakat yang ada di wilayah Kota Makassar. Apa yang terjadi di Panti Pijat D’top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah daerah yang masih lemah dalam mewujudkan keseimbangan dan ketertiban kehidupan masyarakat.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa peran pemerintah, terutama pemerintah kelurahan dalam mencegah terjadinya perilaku menyimpang di Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar adalah hanya sebatas melakukan pengawasan atas waktu beroperasinya tempat hiburan tersebut, yaitu pengawasan mulai jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Adapun peran dalam melakukan penindakan atau penutupan, pemerintah kelurahan tidak memiliki kewenangan, karena sejak awal ijin operasi tempat tersebut (Panti Pijat) proses administrasinya tidak dilakukan oleh pemerintah keluarahan dan kecamatan, akan tetapi dibukanya tempat tersebut atas ijin yang diberikan oleh dinas Pariwisata dan Kantor Perijinan Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah secara hirarki, mulai dari pemerintah daerah Kota Makassar sampai pemerintah kelurahan tidak memiliki langkah-langkah yang konkrit dalam mencegah terjadinya berbagai praktek penyimpangan di Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar. Ijin pembukaan tempat hiburan malam yang diberikan oleh pemerintah daerah tidak diiringi dengan lahirnya kebijakan dan regulasi yang ketat tentang larangan praktek prostitusi atau penyimpangan-penyimpangan sosial lainnya yang terjadi di Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar.

Pada konteks yang demikian, sebenarnya ada banyak yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah terjadinya praktek penyimpangan termasuk prostitusi (pelacuran). Adapun Kartini Kartono (2013: 266-267) mengungkapkan bahwa usaha yang dapat dilakukan oleh semua komponen yang ada dalam mencegah terjadinya perilaku menyimpang adalah meliputi: (a) usaha yang bersifat preventif; dan (b) tindakan yang bersifat represif dan kuratif.

Usaha yang bersifat *preventif* diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya pelacuran. Usaha ini antara lain berupa: (1) Penyempurnaan perundang-undangan mengenai larangan atau pengaturan penyelenggaraan pelacuran; (2) Intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian untuk memperkuat keimanan terhadap nilai-nilai religius dan norma kesusilaan; (3) Menciptakan bermacam-macam kesibukan dan kesempatan bagi anak-anak puber dan *adolesens* untuk menyalurkan kelebihan energinya; (4) Memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita, disesuaikan dengan kodrat dan bakatnya, serta mendapatkan upah/gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya; (5) Penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam kehidupan keluarga; (6) Pembentukan badan atau team koordinasi dari semua usaha penanggulangan pelacuran, yang dilakukan oleh beberapa instansi. Sekaligus mengikut sertakan potensi masyarakat lokal untuk membantu melaksanakan kegiatan pencegahan dan penyebaran pelacuran; (7) Penyitaan terhadap buku-buku dan majala-majalah cabul, gambar-gambar porno, film-film biru dan sarana-sarana lain yang merangsang nafsu seks; dan (8) Meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya.

Sedang usaha yang *represif* dan *kuratif* dimaksudkan sebagai: kegiatan untuk menekan (menghapuskan, menindas) dan usaha menyembuhkan para wanita dari ketuna susilaannya, untuk kemudian membawa mereka ke jalan benar. Usaha *represif* dan *kuratif* ini antara lain berupa: (1) Melalui lokalisasi yang sering ditafsirkan sebagai legalisasi, orang melakukan pengawasan/kontrol yang ketat demi menjamin kesehatan dan keamanan para prostitue serta lingkungannya; (2) Untuk mengurangi pelacuran, diusahakan melalui aktivitas rehabilitasi dan resosialisasi, agar mereka bisa dikembalikan sebagai warga masyarakat yang susila rehabilitasi dan resosialisasi ini dilakukan melalui pendidikan moral dan agama, latihan-latihan kerja dan pendidikan keterampilan agar mereka bersifat kreatif dan produktif; (3) Penyempurnaan tempat-tempat penampungan bagi para wanita tuna susila yang terkena razia, disertai pembinaan mereka, sesuai bakat dan minat masing-masing; (4) Pemberian suntikan dan pengobatan pada interval waktu tetap untuk menjamin kesehatan para prostitue dan lingkungannya; (5) Menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka yang bersedia meninggalkan profesi pelacuran dan mau memulai hidup susila; (6) Mengadakan pendekatan terhadap pihak keluarga para pelacur dan masyarakat asal mereka, agar mereka mau menerima kembali bekas-bekas wanita tuna susila itu mengawali hidup baru; (7) Mencarikan pasangan hidup yang permanen/ suami bagi para wanita tuna susila, untuk membawa mereka ke jalan benar; dan (8) Mengikut sertakan ex WTS (bekas wanita tuna susila) dalam usaha transmigrasi, dalam rangka pemerataan penduduk di tanah air dan perluasan kesempatan kerja bagi kaum wanita.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa peran yang dapat diambil oleh pemerintah dalam mencegah terjadinya praktek penyimpangan di Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar sebenarnya cukup banyak. Dalam hal ini sangat diperlukan komitmen dan kemauan yang tinggi dari pemerintah. Hasil penelitian ini telah mengungkap bahwa peran pemerintah dalam mencegah terjadinya praktek penyimpangan di Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar masih sangat minim. Hal ini dapat dilihat dari semakin tumbuhnya praktek-praktek penyimpangan yang sejenis, seperti halnya minuman keras. Hasil penelitian juga telah mengungkap bahwa koordinasi dari semua instansi terkait belum berjalan secara optimal dalam rangka mencegah terjadinya berbagai praktek penyimpangan.

1. **Implikasi Sosial Dari Keberadaan Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar**

Secara teoritis, setiap praktek penyimpangan selalu membawa implikasi dalam kehidupan sosial budaya masyarakat. Pada konteks ini keberadaan setiap tempat hiburan malam mengundang banyak persoalan. Demikian halnya dengan keberadaan Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar.

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dipaparkan bahwa implikasi sosial keberadaan Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukan Kota Makassar telah melahirkan perbedaan pandangan yang tajam dari berbagai kelompok masyarakat, terutama masyarakat yang ada di sekitar lokasi Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar tersebut, dimana masyarakat terbagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok yang menerima dan menolak keberadaan Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar. Masing-masing kelompok memiliki pandangan atau alasan yang sama-sama bisa diterima. Alasan bagi kelompok yang menerima bersifat ekonomis, dimana dampak dari keberadaan Panti Pijat D’Top dapat dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi kecil sebagai tempat mencari nafkah, sementara alasan dari kelompok yang menolak, dimana dengan keberadaan Panti Pijat D’Top dengan berbagai kegiatan terlarang seperti prostitusi membawa dampak pada kerusakan moral generasi muda di masa yang akan datang.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Kartini Kartono (2013: 241-251) bahwa akibat yang timbul dari adanya praktek pelacuran (prostitusi) yaitu: (1) menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit kelamin dan kulit; (2) merusak sendi-sendi kehidupan keluarga. Suami istri yang tergoda oleh pelacur biasanya melupakan fungsinya sebagai kepala keluarga, sehingga keluarga menjadi berantakan; (3) mendemoralisasi atau memberikan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan khususnya anak-anak muda remaja pada masa puber dan adolesensi; (4) berkorelasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkotika (ganja, morfin, heroin, dan laian); (5) merusak sendi-sendi moral susila, hukum, dan agama. Terutama sekali menggoyahkan norma perkawinan, sehingga menyimpang dari adat kebiasaan, norma hukum, dan agama, karena digantikan dengan pola pelacuran dan promiskuitas, yaitu digantikan dengan pola pemuasan, kebutuhan seks, dan kenikmatan seks yang awut-awutan, murah, serta tidak bertanggung jawab; (6) adanya pola pengeksploitasian manusia oleh manusia lain. Pada umumnya wanita-wanita pelacur itu cuma menerima upah sebagian kecil saja dari pendapatan yang harus diterimanya, karena sebagian besar harus diberikan kepada germo, calo-calo, centeng-centeng, pelindung, dan lain-lain. Dengan kata lain, ada sekelompok manusia benalu yang memeras darah dan keringat para pelacur ini; dan (7) bisa menyebabkan tejadinya disfungsi seksual, misalnya: impotensi, anorgasme, dan lain-lain.

Mengacu pada pandangan tersebut, hasil penelitian ini juga telah melahirkan implikasi sosial dalam kehidupan masyarakat, dimana kehadiran Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kot Makassar telah melahirkan disintegrasi sosial, yaitu kondisi dimana masyarakat dengan berbagai kelompok tertentu mengalami ketidakharmonisan terutama dari segi pemahaman terhadap keberadaan Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar.

Kondisi sebagaimana yang terungkap dari hasil penelitian tersebut telah digambarkan oleh Emile Durkheim dalam kajiannya tentang masyarakat. Durkheim telah mengungkapkan bahwa pencapaian kehidupan sosial manusia dan eksistensi keteraturan sosial dalam masyarakat yang disebut solidaritas sosial, dimantapkan oleh sosialisasi, yang melalui proses tersebut manusia secara kolektif belajar standar-standar atau aturan-aturan perilaku. Dalam masyarakat yang kuat dan tertib, kebebasan individual hanya dapat terjadi apabila keyakinan dan perilaku diatur dengan sebaik-baiknya melalui sosialisasi. Individu patuh kepada masyarakat dan kepatuhan ini adalah kondisi bagi kebebasannya. Bagi manusia, kebebasan berarti terbebas dari pemaksaan fisik yang membabi-buta, kondisi ini dicapai dengan mematuhi kekuatan besar dan cerdas, yakni masyarakat yang dibawah pengaturannya individu berlindung.

**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. **Faktor Yang Melatarbelakangi Perubahan Fungsi Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar**

Faktor yang melatarbelakangi perubahan fungsi Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar adalah berawal dari kondisi pribadi yang dialami oleh individu pekerja (karyawan) Panti Pijat itu sendiri atau faktor dari dalam yaitu kondisi ekonomi, di mana karyawan yang melakukan pelacuran karena di dasari oleh rendahnya prekonomian yang dimiliki di dalam keluarganya, rendahnya pendidikan yakni dengan rendahnya pendidikan yang dialami oleh karyawan disertai dengan kurangnya keterampilan yang dimiliki menyebabkan karyawan terpaksa melakukan praktik pelacuran dan perceraian yakni dengan adanya dampak perceraian menyebabkan karyawan yang ada di panti pijat melakukan pelacuran sebagai cara melampiaskan napsunya dengan motif mendapatkan ekonomi yang sebasar-besarnya.

1. **Peran Pemerintah dalam Mencegah Terjadinya Penyimpangan Di Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar**

Peran pemerintah daerah, terutama pemerintah kelurahan dalam mencegah terjadinya perilaku menyimpang adalah sebatas melakukan pengawasan atas waktu beroperasinya tempat hiburan tersebut, yaitu pengawasan mulai jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Adapun peran dalam melakukan penindakan atau penutupan, pemerintah kelurahan tidak memiliki kewenangan, karena sejak awal ijin operasi tempat tersebut (Panti Pijat) proses administrasinya tidak dilakukan oleh pemerintah keluarahan dan kecamatan, akan tetapi dibukanya tempat tersebut atas ijin yang diberikan oleh dinas Pariwisata dan Kantor Perijinan Provinsi Sulawesi Selatan.

1. **Implikasi Sosial Dari Keberadaan Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar**

Implikasi sosial keberadaan Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukan Kota Makassar telah melahirkan perbedaan pandangan yang tajam dari berbagai kelompok masyarakat, terutama masyarakat yang ada di sekitar lokasi Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar tersebut, dimana masyarakat terbagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok yang menerima dan menolak keberadaan Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar. Masing-masing kelompok memiliki pandangan atau alasan yang sama-sama bisa diterima. Alasan bagi kelompok yang menerima bersifat ekonomis, dimana dampak dari keberadaan Panti Pijat D’Top dapat dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi kecil sebagai tempat mencari nafkah, sementara alasan dari kelompok yang menolak, dimana dengan keberadaan Panti Pijat D’Top dengan berbagai kegiatan terlarang seperti hal prostitusi membawa dampak pada kerusakan moral generasi muda.

1. **Saran**

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Kepada para pekerja (karyawan) Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakukang Kota Makassar agar mengindahkan norma-norma sosial yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat. Panti Pijat dengan fungsi utama sebagai tempat hiburan dan rekreasi atau tempat pemijatan bagi para pengunjung harus dipertahankan tanpa melakukan proses perubahan atas fungsi utama Panti Pijat tersebut.
2. Kepada pemerintah daerah agar senantiasa meningkatkan aktivitas pencegahan dan pengawasan terhadap tumbuh suburnya praktek penyimpangan atau prostitusi (Pijat Plus-Plus). Setiap praktek terlarang yang terjadi di Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar perlu ditindak secara tegas.
3. Masyarakat perlu menyikapi keberadaan Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar dengan cara-cara yang baik berdasarkan norma-norma yang berlaku, baik norma agama, norma hukum, maupun norma sosial. Praktek penyimpangan (Pijat Plus-Plus) di Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar perlu dicarikan solusi bersama, agar tidak menimbulkan disintegrasi sosial.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ahmadin. 2013. *Metode Penelitian Sosial*. Rayhan Intermedia. Makassar

Arisandi, Herman. 2015. *Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi Dari Klasik Sampai Modern*. Yogyakarta: IRCiSoD.

Eka Dewi, Heriana. 2012. *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.

Hendropuspito. 1989. *Sosiologi Sistematik.* Yogyakarta: Kanisius.

Homans, George C. 196. *Social Behavior: Its Elementary Forms.* New York: Harcourt Brace, and World.

John W, Creswell. 2008. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed,* (Edisi Ketiga) Bandung : Pustaka Pelajar.

Judistira K. Garna. 1996. *Ilmu-ilmu Sosial Dasar – Konsep – Posisi.* Bandung: PPs. UNPAD.

Kartono, Kartini. 2005. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

.......................... 2013. *Patologi Sosial.* Cet. Ke13. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.

Kauma, Fuad. 2002. *Sensasi Remaja Di Masa Puber*. Bandung: Kalam Mulia.

Moleong. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Pawito. 2007. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara.

Ritzer, George., & Goodman, Douglas J. 2011. *Teori Sosiologi Modern*. Ed. 6, Cet-7. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Riyanto, Yatim. 2007. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif*. Surabaya: Unesa University Press.

Saptari, Ratna. 1997. *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan*. Jakarta: Kalyanamitra.

Satori, Djam’an & Komariah, Aan. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Simandjuntak. 1985. *Patologi Sosial*. Bandung: Tarsito.

81

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sunarto, Kumanto. 1993. *Pengantar Sosiologi.*Jakarta: Fakultas Ekonomi.

Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Penyimpangan****.*** Jakarta: Rajawali.

Sulistyaningsih. Hull. 1997. *Pelacuran di Indonesia*: *Sejarah dan Perkembangan*, Jakarta: Erlangga.

Syamsi, Ibnu. 2010. *Sosiologi Deviasi: Sebuah Kajian Dari Sudut Pandang Pendidikan, Sosiologi, dan Filsafat.* Yogyakarta: Venus Gold Press.

Wilis, Sofyan S. 2012. *Remaja dan Permasalahannya*. Bandung: Alfabeta

**Sumber online:**

<http://m.beritakotaonline.com/1378/jelang-ramadhan-polsek-panakkukang-razia-panti-pijat/> (dikases tanggal 28 Oktober 2015).

<http://news.detik.com/berita/2614328/mengintip-praktik-prostitusi-tersembunyi-di-makassar/> (diakses tanggal 28 Oktober 2015)

<http://psynetpreneur.blogspot.com/2008/08/patologi-sosial.html> (diakses tanggal 30 Oktober 2015).

<http://www.google.co.id/pp+tentang+kebudayaan+dan+pariwisata>

(Diakses Tanggal 1 Desembar 2015)